

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPATIF
ANGGARAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA
DI KECAMATAN BANDA RAYA PERIODE 2024**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

DIFA MAHIRAH FAISAL

NPM : 2202120029



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 - 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Manajemen
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 26 Agustus 2026

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

DIFA MAHIRAH FAISAL
NPM: 2202120029

Dengan judul:

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPATIF
ANGGARAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI
KECAMATAN BANDA RAYA PERIODE 2024.**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat – syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan:

Ketua Program Studi
Manajemen

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zuraidah, S.E., M.M

NIK: 19770123 200807 2 001

Dr. Zuraidah, S.E., M.M

NIK: 19770123 200807 2 001

Syamsidar, S.E., M.Si., Ak.CA

NIK. 19730921 199901 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Marlizar, S.E., M.M.

NIK. 19820911 201306 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 - 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Manajemen
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 26 Agustus 2026

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

DIFA MAHIRAH FAISAL
NPM: **2202120029**

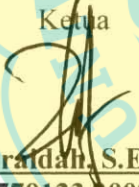
Dengan judul:

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPATIF ANGGARAN
TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BANDA
RAYA PERIODE 2024.**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 12 Agustus 2026.

Menyetujui / Mengesahkan:
Komisi Ujian

Ketua


Dr. Zuraidah, S.E., M.M
NIK: 19770123 200807 2 001

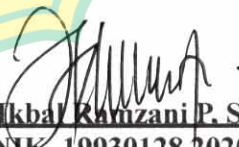
Anggota


Dr. Agus Ariyanto, S.E., M.Si
NIK: 19760824 201112 1 001

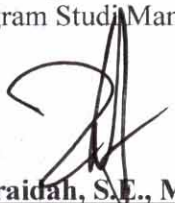
Sekretaris


Syamsidar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK: 19730921 199901 2 001

Anggota


Ikbal Ramzani P. S.E., M.E
NIK: 19930128 202011 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen


Dr. Zuraidah, S.E., M.M
NIK: 19770123 200807 2 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif Anggaran Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banda Raya Periode 2024”. Shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berakhlak dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen di Universitas Muhammadiyah Aceh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kesabaran, kasih sayang dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa kedua orang tua tercinta, Ayahanda Faisal dan Ibunda Silvia Rahma yang tidak pernah berhenti memberikan doa, kasih sayang, motivasi, dan pengorbanan demi keberhasilan penulis.

2. Saudara kandung penulis Shelqia Rifa Faisal, Hanif Al-Hakim Faisal, dan Syaqif Al-Hakim Faisal, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan perhatiannya selama proses pengerjaan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Aslam Nur, M.A selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak Dr. Marlizar, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Dr. Zuraidah, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Ibu Suryani Murad, S.E., M.Si selaku Ketua Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Ibu Dr. Zuraidah, S.E., M.M selaku Pembimbing I dan Ibu Syamsidar, S.E., M.Si., Ak. CA selaku Pembimbing II yang telah bersabar memberikan bimbingan, masukan, kritik dan dorongan yang sangat berharga selama penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya Program Studi Manajemen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu.
9. Teman-teman seperjuangan, khususnya grup goyang duman yang selalu memberikan dukungan moral, semangat, dan kebersamaan, serta saling menguatkan satu sama lain selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih untuk diri sendiri yang telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini untuk melewati setiap proses

penyusunan skripsi ini hingga selesai. Semoga perjalanan ini menjadi awal dari pencapaian yang lebih baik di masa depan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Akhirnya, hanya kepada Allah penulis menyerahkan segalanya. Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan dari berbagai pihak mendapat balasan dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Banda Aceh, 06 Juli 2026

Penulis

Difa Mahirah Faisal

2202120029

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Ruang Lingkung Penelitian.....	15
BAB II	16
KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	16
2.1 Landasan Teoritis	16
2.1.1 Efektivitas.....	16
2.1.1.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas	17
2.1.1.2 Indikator Efektivitas.....	18
2.1.2 Transparansi	20
2.1.2.1 Indikator Transparansi.....	23
2.1.3 Akuntabilitas	26
2.1.3.1 Indikator Akuntabilitas	28
2.1.4 Partisipatif Anggaran.....	30
2.1.4.1 Indikator Partisipatif Anggaran.....	34
2.2 Penelitian Sebelumnya	36
2.3 Hubungan Antar Variabel	42
2.4 Kerangka Pemikiran.....	45
2.5 Hipotesis Penelitian.....	46
BAB III.....	47
METODE PENELITIAN	47

3.1	Desain Penelitian.....	47
3.1.1	Tujuan Penelitian.....	47
3.1.2	Jenis Penelitian.....	47
3.1.3	Horizon Waktu	48
3.1.4	Unit Analisis.....	49
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian	50
3.2.1	Populasi Penelitian	50
3.2.2	Sampel Penelitian.....	51
3.3	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.4	Definisi dan Operasionalisasi Variabel	56
3.5	Teknik Analisis Data.....	58
3.6	Pengujian Data	59
3.6.1	Uji Validitas	59
3.6.2	Uji Reabilitas.....	60
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	61
3.6.3.1	Uji Normalitas	62
3.6.3.2	Uji Multikolinearitas	62
3.6.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	63
3.7	Uji Hipotesis.....	63
3.7.1	Uji t (Parsial)	64
3.7.2	Uji f (Simultan)	65
3.7.3	Koefisien Korelasi (R)	66
3.7.4	Koefisien Determinasi (R^2).....	66
BAB IV		68
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		68
4.1	Gambaran Umum Kecamatan Banda Raya.....	68
4.2	Karakteristik Responden	70
4.2.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	70
4.2.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	71
4.2.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	72
4.2.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Desa.....	73
4.2.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	74
4.3	Hasil Pengujian Data.....	76

4.3.1 Uji Validitas Instrumen	76
4.3.2 Uji Reabilitas Instrumen.....	78
4.3.3 Uji Asumsi Klasik	79
4.3.3.1 Hasil Uji Normalitas.....	79
4.3.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	81
4.3.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	82
4.4 Analisis Deskriptif.....	83
4.1 Variabel Transparansi	83
4.2 Variabel Akuntabilitas.....	85
4.3 Variabel Partisipatif Anggaran.....	87
4.4 Variabel Efektivitas.....	89
4.5 Pembahasan.....	91
4.5.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	91
4.5.1 Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2)	93
4.5.2 Pembuktian Hipotesis.....	94
BAB V	102
KESIMPULAN DAN SARAN	102
5.1 Kesimpulan.....	102
5.2 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Alokasi Dana Desa.....	9
Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas.....	17
Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya	40
Tabel 3.1 Horizon Waktu	48
Tabel 3.2 Populasi Penelitian.....	51
Tabel 3.3 Skala Pengukuran.....	55
Tabel 3.4 Definisi dan Operasional Variabel.....	56
Tabel 4.1 Distribusi Responden	70
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	70
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	71
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	72
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Desa.....	74
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	75
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas.....	77
Tabel 4.8 Hasil Uji Reabilitas	78
Tabel 4.9 Nilai Variance Inflation Factor (VIF) Masing-Masing Variabel	81
Tabel 4.10 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Transparansi	84
Tabel 4.11 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas	86
Tabel 4.12 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Partisipatif Anggaran.....	88
Tabel 4.13 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Efektivitas.....	90
Tabel 4.14 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	91
Tabel 4.15 Tabel Model Summary.....	93
Tabel 4.16 Hasil Uji T (Parsial)	95
Tabel 4.17 Analysis Of Variance (ANOVA).....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	46
Gambar 4.1 Normal Probability Plot Hasil Pengujian Normalitas Data.....	80
Gambar 4.2 Grafik Scatterplot Hasil Pengujian Heteroskedastisitas.....	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Dokumentasi APBG&LPJ	108
Lampiran 2 Kuisisioner Penelitian	113
Lampiran 3 Laporan Pendapatan & Realisasi Anggaran Desa	118
Lampiran 4 Karakteristik Responden.....	121
Lampiran 5 Frekuensi Karakteristik Responden.....	126
Lampiran 6 Frekuensi Transparansi (X1)	128
Lampiran 7 Frekuensi Akuntabilitas (X2)	130
Lampiran 8 Frekuensi Partisipatif Anggaran (X3).....	132
Lampiran 9 Frekuensi Efektivitas (Y).....	134
Lampiran 10 Reabilitas dan Validitas Efektivitas (Y)	136
Lampiran 11 Reabilitas dan Validitas Transparansi (X1).....	137
Lampiran 12 Reabilitas dan Validitas Akuntabilitas (X2).....	138
Lampiran 13 Reabilitas dan Validitas Partisipatif Anggaran (X3)	139
Lampiran 14 Regresi	140
Lampiran 15 Nilai F Tabel Pada Tingkat Keyakinan 95%	143
Lampiran 16 Nilai T Tabel.....	144
Lampiran 17 Nilai-Nilai r Product Moment Pada Keyakinan 95%	145

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPATIF
ANGGARAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA
DI KECAMATAN BANDA RAYA PERIODE 2024**

DIFA MAHIRAH FAISAL
2202120029

Pembimbing 1 : Dr. Zuraidah, S.E., M.M

Pembimbing 2 : Syamsidar., S.E., M.Si., Ak,CA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya periode 2024, baik secara parsial maupun simultan. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal, data dikumpulkan melalui kuisioner dari 68 responden yang terdiri dari aparatur desa dan perwakilan masyarakat di 10 desa di Kecamatan Banda Raya. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda, setelah memastikan validitas dan reliabilitas instrument serta memenuhi asumsi klasik (normalitas, multikolineritas, dan heteroskedastisitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Lebih lanjut, ketiga variabel ini secara simultan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, menjelaskan 48,5% variasi efektivitas pengelolaan dana desa. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti keterbukaan informasi, pertanggungjawaban yang kuat, dan pelibatan aktif masyarakat, untuk memastikan pengelolaan dana desa yang profesional, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna mendorong pembangunan desa yang efektif.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif Anggaran, Efektivitas.

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPATIF
ANGGARAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA
DI KECAMATAN BANDA RAYA PERIODE 2024**

DIFA MAHIRAH FAISAL
2202120029

Pembimbing 1 : Dr. Zuraidah, S.E., M.M

Pembimbing 2 : Syamsidar., S.E., M.Si., Ak,CA

ABSTRACT

This study empirically analyzes and tests the influence of transparency, accountability, and budget participation on the effectiveness of village fund management in Banda Raya District during the 2024 period, both partially and simultaneously. Employing a quantitative approach with a causal associative design, data was collected through questionnaires from 68 respondents, comprising village officials and community representatives across 10 villages in Banda Raya District. Data analysis utilized multiple linear regression, after ensuring the validity and reliability of the instruments and fulfilling classical assumptions (normality, multicollinearity, and heteroscedasticity). The research findings indicate that transparency, accountability, and budget participation each have a positive and significant partial effect on the effectiveness of village fund management. Furthermore, these three variables collectively also have a positive and significant impact on the effectiveness of village fund management, explaining 48,5% of the variation in village fund management effectiveness. The implications of these findings highlight the importance of implementing good governance principles, such as information openness, strong accountability, and active community involvement, to ensure professional, efficient, and community-need-aligned village fund management, thereby fostering effective village development.

Key Word : Transparency, Accountability, Budget Participation, Effectiveness.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Desa adalah landasan hukum yang mengatur pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan desa, memberikan otonomi desa untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dengan tujuan menciptakan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, yang mencakup pengaturan tentang keuangan desa, aset desa, BUMDes, hingga kewenangan dan kelembagaan desa. Kebijakan Dana Desa di Indonesia merupakan elemen fundamental dalam perekonomian desa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Idealnya, pengelolaan dana desa harus mencerminkan prinsip *Good Village Governance*. Namun, realita di lapangan masih banyak ditemukan kasus penyelewengan dana desa, laporan fiktif, hingga ketidaktepatan sasaran program pembangunan.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh dan Kementerian Keuangan, total alokasi Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN untuk Kota Banda Aceh pada tahun 2024 adalah sekitar Rp77,08 miliar. Dana ini dialokasikan untuk 90 gampong (desa) yang tersebar di wilayah Kota Banda Aceh. Seiring membesarnya alokasi Dana Desa dari tahun ke tahun, tuntutan terhadap tata kelola yang efektif ikut meningkat. Masalah efektivitas juga muncul ketika anggaran yang terserap besar, namun dampak terhadap

kesejahteraan masyarakat tidak signifikan. Hal ini sering kali dipicu oleh rendahnya pengawasan dan lemahnya sistem manajerial di tingkat desa. Kondisi makro di Kota Banda Aceh ini tercermin secara nyata di tingkat wilayah yang lebih spesifik, salah satunya di Kecamatan Banda Raya. Sebagai wilayah perkotaan yang strategis, Kecamatan Banda Raya memegang porsi alokasi anggaran yang signifikan, namun masih menghadapi kontradiksi besar antara besarnya dana yang disalurkan dengan riil efektivitas capaian pembangunan di tingkat desa.

Efektivitas pengelolaan tidak hanya diukur dari serapan anggaran atau penyelesaian fisik, tetapi juga dari kesesuaian program dengan kebutuhan warga serta keberlanjutan manfaatnya. Dalam konteks tersebut, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggaran menjadi prasyarat agar dana desa benar-benar berdampak pada sasaran yang diinginkan.

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan dana desa yang mengharuskan keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana tersebut kepada masyarakat. Dalam konteks dana desa, transparansi mengacu pada kemudahan akses masyarakat terhadap informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Prinsip transparansi menjadi penting karena dana desa merupakan anggaran publik yang harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Implementasi transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti publikasi informasi di papan pengumuman desa, penyampaian informasi dalam forum musyawarah desa,

serta pemanfaatan media teknologi informasi seperti *website* desa atau media sosial untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas.

Ketika informasi tentang penggunaan dana desa tersedia secara terbuka, masyarakat dapat melakukan pengawasan sosial (*social control*) terhadap penggunaan anggaran tersebut. Pengawasan dari masyarakat ini akan mendorong pemerintah desa untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola dana desa, sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran. Selain itu, transparansi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya, implementasi transparansi di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman aparatur desa tentang pentingnya transparansi, keterbatasan sarana dan prasarana untuk menyebarluaskan informasi, serta budaya birokrasi yang cenderung tertutup.

Selain transparansi, akuntabilitas menjadi aspek penting yang menjamin bahwa pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. Akuntabilitas mendorong pemerintah desa untuk menggunakan dana sesuai dengan peraturan dan mengharuskan pelaporan yang jelas atas penggunaan dana tersebut. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat serta meningkatkan kredibilitas tata kelola dana desa (Fadilla & Sinurat, 2023).

Akuntabilitas mencakup aspek administratif berupa penyusunan laporan keuangan dan laporan realisasi kegiatan yang sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku, serta aspek publik berupa pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa dan pencapaian hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tidak dapat diabaikan karena akuntabilitas merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem akuntabilitas yang baik, pemerintah desa akan lebih disiplin dalam mengelola keuangan desa dan melaksanakan program-program pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Akuntabilitas juga berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan dana desa. Namun, implementasi akuntabilitas di tingkat desa seringkali terhambat oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang memenuhi standar, lemahnya sistem pengawasan internal, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak mereka untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah desa.

Partisipatif anggaran merupakan proses perencanaan dan penganggaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan prioritas program, pengambilan keputusan alokasi anggaran, hingga pengawasan pelaksanaan dan evaluasi program. Dalam konteks pengelolaan dana desa, partisipatif anggaran diwujudkan melalui

mekanisme musyawarah desa (musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) yang menjadi forum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka serta terlibat dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan dana desa. Prinsip partisipatif anggaran sejalan dengan semangat demokrasi dan otonomi desa yang memberikan kewenangan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan mereka sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Partisipasi anggaran memberi ruang bagi warga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pemangku kepentingan lokal untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Ketika masyarakat terlibat dalam perencanaan, program-program yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat dalam pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat juga meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program-program pembangunan desa, sehingga masyarakat akan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* dalam pengelolaan dana desa, di mana masyarakat dapat mengawasi secara langsung penggunaan dana desa dan memberikan masukan untuk perbaikan. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang

pentingnya partisipasi, dominasi elit desa dalam pengambilan keputusan, keterbatasan akses informasi, serta kurangnya kapasitas masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara efektif.

Efektivitas pengelolaan dana desa merupakan ukuran keberhasilan dalam mengelola dana tersebut sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan desa secara optimal. Efektivitas tidak hanya diukur dari aspek penyerapan anggaran atau tingkat realisasi kegiatan, tetapi juga mencakup kualitas pelaksanaan program, dampak yang dihasilkan bagi masyarakat, serta keberlanjutan hasil-hasil pembangunan. Pengelolaan dana desa dikatakan efektif apabila dana yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menanggulangi kemiskinan. Efektivitas pengelolaan dana desa juga mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan secara sistematis dan terukur.

Berbagai faktor dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa, termasuk kapasitas aparatur desa, sistem tata kelola pemerintahan desa, mekanisme transparansi dan akuntabilitas, serta tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di berbagai daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat efektivitasnya, seperti keterlambatan pencairan dana, rendahnya kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, lemahnya sistem pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Permasalahan-

permasalahan ini berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran, pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta minimnya dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa, khususnya faktor-faktor yang terkait dengan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di masa mendatang.

Rendahnya efektivitas pengelolaan dana desa seringkali dikaitkan dengan kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang menyebabkan dana desa tidak tepat sasaran dan kurang memberikan manfaat yang maksimal (Pribadi, 2024).

Kecamatan Banda Raya merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah perkotaan Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Kecamatan ini terdiri dari 10 desa yang masing-masing memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi kondisi geografis, jumlah penduduk, mata pencaharian masyarakat, maupun tingkat kesejahteraan ekonomi. Letak Kecamatan Banda Raya yang strategis di pusat kota menjadikannya sebagai salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dalam program pembangunan, termasuk dalam alokasi dan pengelolaan dana desa. Keberagaman karakteristik desa-desa di Kecamatan Banda Raya memberikan dinamika tersendiri dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa, di mana setiap desa memiliki tantangan dan peluang yang berbeda dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk

kesejahteraan masyarakat. Secara demografis, Kecamatan Banda Raya memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif stabil.

Pada periode 2024, 10 desa di Kecamatan Banda Raya menerima alokasi dana desa dari pemerintah pusat melalui mekanisme transfer APBN dengan jumlah yang bervariasi tergantung pada formula perhitungan yang mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa tersebut dialokasikan untuk berbagai bidang pembangunan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi desa, serta program-program kesehatan dan pendidikan. Berikut ini adalah rekapitulasi alokasi dana desa yang diterima oleh beberapa desa, jumlah anggaran yang terealisasi dan jumlah efektivitasnya di 10 desa yang terdapat di Kecamatan Banda Raya.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Alokasi Dana Desa Kecamatan Banda Raya Tahun 2024

No	Nama Desa	Anggaran	Realisasi	Efektivitas
1	Geuceu Iniem	Rp 1.690.714.457	Rp 1.428.030.200	84%
2	Geuceu Kayee Jato	Rp 1.494.575.426	Rp 1.282.736.310	86%
3	Geuceu Komplek	Rp 2.065.874.954	Rp 1.853.193.241	90%
4	Lam Ara	Rp 1.873.273.408	Rp 1.964.547.935	105%
5	Lampeuot	Rp 1.631.310.835	Rp 1.461.486.401	90%
6	Lamlagang	Rp 1.796.555.070	Rp 1.542.048.345	86%
7	Lhong Cut	Rp 1.710.399.337	Rp 1.470.886.220	86%
8	Lhong Raya	Rp 1.846.342.818	Rp 1.564.845.943	85%
9	Mibo	Rp 1.748.368.149	Rp 1.536.940.251	85%
10	Peunyeurat	RP 1.570.626.070	Rp 1.341.787.953	85%

Sumber : Laporan Realisasi APBG & Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2024

Berdasarkan data realisasi dana desa di Kecamatan Banda Raya tersebut, hanya terdapat 30% desa yang berhasil mencapai target kategori "Efektif" yakni Geuceu Komplek, Lam Ara, dan Lampeuot, sementara 70% lainnya masih berada di bawah kategori "Efektif" dan tertahan di level "Cukup Efektif" dengan rata-rata serapan anggaran di angka 84% hingga 86%, yang berarti pengelolaan dana desa sudah aman secara administratif, namun belum optimal secara performa untuk mendorong pembangunan desa secara agresif. Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan pengelolaan dana desa yang bersifat *conservative spending*. Mayoritas desa memiliki angka efektivitas yang sangat seragam dan berhimpit di angka 85%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar perangkat desa masih menghadapi hambatan administratif yang serupa

atau memiliki keraguan dalam mengeksekusi anggaran secara maksimal agar tidak terjadi kesalahan prosedur. Keseragaman angka efektivitas yang tertahan di angka 85% pada mayoritas desa di Kecamatan Banda Raya (7 dari 10 desa) mengindikasikan gejala patologi birokrasi yang serius, di mana orientasi pengelolaan anggaran terjebak pada *compliance-driven* (orientasi kepatuhan formal) dan mengabaikan *performance-driven* (orientasi kemanfaatan riil). Aparatur desa cenderung memilih bermain aman dengan merealisasikan anggaran hanya pada program-program fisik konvensional yang mudah dipertanggungjawabkan di atas kertas, meskipun program tersebut belum tentu menjadi prioritas utama masyarakat setempat. Ketakutan kolektif terhadap sanksi hukum akibat kesalahan administratif telah menciptakan stagnasi serapan kontrol, di mana dana publik tersimpan di rekening desa tanpa bisa dikonversi menjadi stimulus pembangunan ekonomi. Di sisi yang berlawanan, Desa Lam Ara memicu anomali besar dengan tingkat efektivitas mencapai 105%. Angka yang melampaui batas plafon anggaran (*over-budgeting*) ini bukan sekadar cerminan agresivitas penyerapan, melainkan indikasi kuat dari lemahnya fungsi *forecasting* (peramalan) dan miscalculasi dalam tahap perencanaan anggaran. Ketiadaan standar kinerja yang konsisten di satu wilayah kecamatan yang sama ini membuktikan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa belum didasarkan pada tata kelola keuangan yang matang, melainkan masih bersifat sporadis dan eksperimental.

Untuk memperkuat fenomena tersebut, peneliti melakukan survei awal terhadap 10 desa di Kecamatan Banda Raya. Hasil survei awal menunjukkan

bahwa tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa masih bervariasi dan terbatas, di mana masyarakat tidak mengetahui secara detail jumlah dana serta realisasi penggunaan anggaran. Format publikasi yang digunakan juga terlalu teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat awam, sehingga fungsi transparansi tidak tercapai secara optimal. Dari segi akuntabilitas administratif, beberapa desa masih mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada pemerintah atasan dan minim forum pertanggungjawaban yang interaktif dengan warga. Lebih lanjut, survei awal juga menangkap lemahnya aspek partisipatif anggaran, di mana forum Musrenbangdes sering kali hanya menjadi formalitas yang didominasi oleh elit desa tanpa melibatkan aspirasi riil kelompok masyarakat bawah. Lemahnya sinergi antara transparansi yang terbatas, akuntabilitas yang sekadar formalitas pengarsipan, dan partisipasi yang semu inilah yang diduga menjadi akar penyebab mengapa 70% gampong di Kecamatan Banda Raya gagal mencapai tingkat efektivitas pengelolaan dana desa yang optimal.

Kondisi empiris di lapangan memperlihatkan adanya kelemahan sistemik pada tiga pilar utama tata kelola desa. Transparansi yang diterapkan saat ini masih berada pada level "Transparansi Ilusif", di mana baliho anggaran dipasang sekadar untuk menggugurkan kewajiban visual, namun substansinya tidak komunikatif karena dipenuhi istilah akuntansi yang menjauhkan masyarakat dari pemahaman yang utuh. Akuntabilitas pun mengalami reduksi makna, dari yang seharusnya menjadi instrumen pertanggungjawaban moral dan kinerja kepada publik, bergeser menjadi sekadar tumpukan berkas administratif demi menghindari temuan auditor. Dampak langsung dari lemahnya sinergi ketiga

variabel ini bermuara pada rendahnya kualitas efektivitas pengelolaan dana desa. Selama informasi ditutupi, pertanggungjawaban diasingkan dari publik, dan suara masyarakat dibungkam dalam perencanaan, maka Dana Desa di Kecamatan Banda Raya akan terus terperangkap dalam siklus alokasi yang tidak tepat sasaran dan gagal memberikan daya ungkit ekonomi yang agresif bagi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif Anggaran Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Banda Raya Periode 2024”.

Urgensi penelitian ini juga didukung oleh pentingnya evaluasi pengelolaan dana desa sebagai bahan masukan kebijakan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lain untuk memperbaiki tata kelola keuangan desa.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya ?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya ?
3. Bagaimana pengaruh Partisipatif anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya ?

4. Bagaimana pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran secara simultan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya.
2. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya.
3. Menganalisis pengaruh partisipatif anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya.
4. Menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran secara simultan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian inii diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang tata kelola keuangan desa. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif

anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, sehingga dapat menjadi referensi penting bagi studi-studi berikutnya terkait manajemen keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori tentang pentingnya keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, dan partisipatif anggaran dalam meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pemerintah desa, sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam meningkatkan mekanisme pengelolaan dana desa. Bagi pemerintah gampong dan kecamatan, penelitian ini menyediakan dasar empiris untuk perbaikan SOP, mekanisme publikasi informasi anggaran, serta penguatan forum musyawarah. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat, hasilnya dapat menjadi rujukan dalam pengawasan sosial yang terarah melalui indikator transparansi dan akuntabilitas yang terukur. Bagi pendamping desa, temuan penelitian dapat digunakan untuk merancang program peningkatan kapasitas aparatur dan literasi anggaran. Bagi pemerintah daerah, rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung penyesuaian kebijakan, penguatan sistem informasi (misalnya kanal keterbukaan data), dan intervensi pendampingan yang berfokus pada desa dengan kapasitas rendah sehingga efektivitas pengelolaan Dana Desa meningkat merata.

1.5 Ruang Lingkung Penelitian

Ruang lingkup ini berfokus pada pengelolaan Dana Desa di seluruh desa yang terdapat di Kecamatan Banda Raya dengan unit analisis aparatur desa dan perwakilan masyarakat yang terlibat dalam siklus anggaran (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan). Penelitian ini menitikberatkan pada aspek-aspek keterbukaan informasi, pertanggungjawaban dalam penggunaan dana, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan pengelolaan dana desa. Variabel independen mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran, sementara variabel dependen adalah efektivitas pengelolaan Dana Desa yang diukur melalui indikator output dan outcome program. Cakupan waktu mengikuti tahun anggaran 2024 yang datanya tersedia, dengan data primer (kuesioner/ wawancara) dan sekunder (dokumen realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban). Batasan penelitian tidak mencakup sumber pendanaan non-Dana Desa dan tidak menilai partisipasi di luar proses penganggaran formal, sehingga interpretasi hasil dibingkai pada aspek tata kelola anggaran Dana Desa di Kecamatan Banda Raya.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Efektivitas

Efektivitas didefinisikan sebagai kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tepat sasaran dan waktu, sering kali diukur dari kesesuaian hasil kerja dengan rencana organisasi. Konsep ini menekankan pencapaian output yang sesuai input, di mana suatu kegiatan efektif jika berhasil memengaruhi sasaran utama seperti pelayanan masyarakat atau hasil program (Badrian, 2021). Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan desa melalui alokasi dana secara tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. Efektivitas mencakup capaian program pembangunan fisik (seperti infrastruktur jalan dan irigasi) serta non-fisik (pemberdayaan masyarakat), sesuai Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020.

Pengelolaan dana desa dikatakan efektif apabila :

1. Program yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai rencana.
2. Penggunaan dana desa tepat sasaran.
3. Pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Dana desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengukuran efektivitas keuangan daerah umumnya menggunakan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu (realisasi PAD / target PAD dalam APBD) x 100%, dengan kriteria: sangat efektif (>100%), efektif (90-

100%), cukup efektif (80-89%), dan kurang efektif (<80%). Pendekatan ini menilai kemampuan daerah mengoptimalkan pendapatan lokal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik (Setyabudi et al., 2025). Rumus efektivitas :

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Penerimaan} / \text{Target Penerimaan}) \times 100\%$$

Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Persentase
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	<60%

Perhitungan efektivitas pengelolaan dana desa tersebut berdasarkan anggaran pendapatan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa dari sumber Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2024.

2.1.1.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) wajib terintegrasi ke dalam sistem pengelolaan APBDes, sehingga prinsip-prinsipnya sepenuhnya selaras dengan pengelolaan APBDes dan berpedoman pada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024). Beberapa elemen utama yang memengaruhi penyaluran ADD meliputi :

1. Partisipatif

Proses pengelolaan ADD mulai dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan, hingga evaluasi perlu melibatkan berbagai pihak secara luas. Dengan kata lain, pengelolaan ini tidak boleh terbatas pada kelompok elit desa seperti pemerintah desa, BPD, pengurus LKMD/RT/RW, atau tokoh masyarakat saja, melainkan juga harus menggandeng kelompok lain seperti petani, buruh, perempuan, pemuda, dan sebagainya.

2. Transparan

Seluruh proses harus dapat diakses dan diketahui publik secara terbuka. Selain itu, masyarakat desa diupayakan mendapat informasi jelas tentang tujuan, target, hasil, serta manfaat dari setiap aktivitas yang didanai ADD.

3. Akuntabel

Seluruh tahapan penggunaan ADD, dari usulan alokasi, pelaksanaan, hingga capaian akhirnya, harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada semua pihak, khususnya warga desa.

4. Kesetaraan

Setiap pihak yang berperan dalam pengelolaan ADD memiliki hak dan posisi yang setara.

2.1.1.2 Indikator Efektivitas

Indikator efektivitas berdasarkan jurnal Aldi Febriansyah et al (2024) yaitu sebagai berikut :

1. Ketercapaian target anggaran : sejauh mana realisasi dana desa sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBDes.

2. Kesesuaian realisasi dengan rencana : program/kegiatan terlaksana sesuai perencanaan.
3. Tingkat efektivitas penggunaan dana : diukur dari rasio realisasi dibanding target anggaran; kategori efektif jika mencapai 90% - 100%
4. Keberhasilan pelaksanaan program : ditunjukkan oleh terpenuhinya sasaran pembangunan atau pemberdayaan yang direncanakan.

Indikator efektivitas berdasarkan *Goal Attainment Theory* (Steers,1977) dan program publik Sugiyono (2007) yang disesuaikan dengan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

1. Capaian target program dana desa : tingkat realisasi fisik dan finansial program / kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) terhadap rencana awal.
2. Efisiensi penggunaan anggaran : perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan output atau manfaat yang dihasilkan dari program dana desa.
3. Ketepatan waktu pelaksanaan program : persentase proyek dana desa yang diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam APBDes dan Perkada timeline.
4. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil program : rata-rata persepsi masyarakat desa terhadap manfaat dan dampak program dana desa terhadap kesejahteraan mereka.

5. Pengurangan penyelewengan dan penyimpangan dana : penurunan jumlah dan nilai temuan audit atau laporan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang bersifat material.

Dengan demikian, efektivitas pengelolaan dana desa merupakan konsep multidimensi yang melibatkan berbagai aspek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Efektivitas dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan, serta dampak yang dihasilkan bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Transparansi

Transparansi merupakan pilar fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merujuk pada prinsip keterbukaan dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, akurat, dan tepat waktu mengenai seluruh proses penyelenggaraan Negara. Transparansi merupakan asas keterbukaan terhadap hak masyarakat guna memastikan akses informasi yang akurat, adil, dan tidak memihak terkait penyelenggaraan organisasi, sambil tetap menjaga perlindungan privasi individu, kelompok, serta kerahasiaan Negara (Rijal et al., 2021). Masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengetahui bagaimana kebijakan diambil, bagaimana anggaran dialokasikan, dan sejauh mana realisasi di lapangan mencerminkan janji pembangunan yang telah disepakati bersama.

Dalam kerangka Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976), transparansi berfungsi sebagai mekanisme mengurangi asimetri informasi antara principal (masyarakat desa) dan agent (Kepala Desa). Transparansi meminimalisir moral *hazard* dan *adverse selection* melalui *disclosure information* yang tepat waktu, meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah dan dana desa, transparansi memiliki peran yang sangat strategis untuk memastikan bahwa anggaran yang dikelola benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Transparansi anggaran daerah mencakup keterbukaan dalam penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Masyarakat harus dapat mengetahui berapa besar pendapatan daerah, dari mana sumbernya, kemana dialokasikan, untuk program apa saja, dan bagaimana realisasinya.

Secara operasional, transparansi Dana Desa di Indonesia diatur ketat melalui hierarki regulasi yang dimulai dari UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 115 yang mewajibkan pengelolaan transparan dan akuntabel, Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 47 yang menetapkan tiga media wajib publikasi (papan pengumuman desa, website desa, dan media lokal), hingga Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020 yang mewajibkan platform digital informasi desa melalui aplikasi Siskeudes V.3.0. Dokumen yang wajib dipublikasikan meliputi: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) paling lambat Februari, APBDes sebelum 1 April, DIPA Desa setiap 1 Januari, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) triwulanan 15 hari setelah periode, dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LPJ) paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

Pengelolaan Dana Desa menuntut tingkat transparansi yang tinggi karena Dana Desa merupakan dana publik yang digunakan untuk kepentingan masyarakat desa. Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa berarti bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui :

1. Besaran dana desa yang diterima.
2. Peruntukan dan alokasi anggaran dana desa.
3. Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
4. Hasil penggunaan dana desa.

Untuk mewujudkan transparansi yang efektif, diperlukan beberapa prasyarat dan kondisi yang harus dipenuhi. Pertama, *political will* atau kehendak politik yang kuat dari pimpinan pemerintahan untuk menerapkan transparansi secara konsisten. Tanpa komitmen dari pimpinan, transparansi hanya akan menjadi slogan atau formalitas belaka. Kedua, sistem dan prosedur yang jelas dan terstandar dalam pengelolaan informasi publik. Harus ada mekanisme yang jelas tentang jenis informasi apa yang harus dipublikasikan, kapan harus dipublikasikan, melalui media apa, dan siapa yang bertanggung jawab. Ketiga, kapasitas sumber daya manusia yang memadai, baik dari sisi pengelola informasi maupun dari sisi masyarakat sebagai pengguna informasi. Aparatur pemerintah perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola informasi, sementara masyarakat perlu diberikan literasi untuk dapat memahami dan memanfaatkan informasi yang tersedia. Keempat, sarana dan prasarana yang memadai, termasuk sistem teknologi informasi, media publikasi, dan tempat akses informasi. Kelima, mekanisme kontrol dan pengawasan untuk memastikan

bahwa kewajiban transparansi benar-benar dilaksanakan, termasuk sanksi bagi pihak yang melanggar.

2.1.2.1 Indikator Transparansi

Indikator transparansi berdasarkan jurnal Faizatul Wardah & Miftahol Horri (2025) yaitu sebagai berikut :

1. Publikasi dokumen APBDes dan Realisasi secara digital : mengukur modernisasi transparansi fiskal dengan memanfaatkan teknologi informasi. Aparatur tidak lagi hanya mengandalkan metode konvensional, melainkan mengintegrasikan situs web resmi dan jejaring sosial sebagai saluran utama agar dokumen APBDes serta realisasinya dapat dipantau oleh pemangku kepentingan kapan saja.
2. Pelibatan masyarakat melalui forum dan musyawarah desa : menilai keterbukaan proses pengambilan keputusan (*process openness*). Pengukuran difokuskan pada sejauh mana ruang-ruang diskusi formal (seperti Musrenbangdes) dioptimalkan bukan sekedar sebagai pemenuhan formalitas birokrasi, melainkan sebagai wadah autentik bagi warga untuk menyalurkan aspirasi, memberikan kritik, dan mengawal prioritas alokasi dana.
3. Akses informasi terbuka terhadap laporan keuangan dan kinerja : indikator ini berfokus pada dimensi accessibility dan readability. Pengukuran tidak hanya melihat ada atau tidaknya dokumen laporan keuangan, tetapi menguji apakah laporan tersebut benar-benar dapat dijangkau oleh public secara bebas dan

disajikan dalam format yang mudah dipahami oleh masyarakat awam (non-akuntan).

4. Penyampaian informasi melalui media visual dan elektronik di lokasi strategis : pengoperasiannya dinilai dari penempatan alat peraga informative (seperti baliho intografis, papan pengumuman digital, atau videotron) di area-area publik yang padat lalu lintas warga, memastikan bahwa kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet tetap mendapatkan hak informasi yang setara.

Indikator transparansi berdasarkan dimensi Kristianto (2006) dan Permendagri No.20/2018 yaitu sebagai berikut :

1. Keterbukaan informasi penggunaan dana desa : prinsip penyediaan data lengkap dan real-time mengenai alokasi, realisasi, dan sisa anggaran desa kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa diskriminasi. Indikator ini mencakup publikasi rincian setiap pos anggaran (infrastruktur, pemberdayaan, administrasi).
2. Publikasi laporan keuangan desa : kewajiban rutin pemerintah desa memajang dokumen resmi APBDes, DIPA, SPJ triwulan, dan LPJ tahunan di tiga lokasi publik yang ditetapkan undang-undang.
3. Akses masyarakat terhadap data anggaran : kemudahan warga desa memperoleh, memahami, dan memverifikasi informasi pengelolaan dana desa tanpa hambatan administrative, biaya, atau intimidasi.

4. Proses pengambilan keputusan yang jelas : tahapan terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan dari Musrenbangdes hingga persetujuan APBDes yang melibatkan BPD, LKMD, dan masyarakat secara inklusif.
5. Pelaporan realisasi anggaran secara rutin : penyampaian periodik perkembangan fisik dan finansial dana desa setiap triwulan kepada masyarakat melalui forum rapat umum desa dan publikasi resmi.

Secara keseluruhan, transparansi bukan hanya merupakan kewajiban hukum atau tuntutan teknis semata, melainkan merupakan hak dasar masyarakat dalam negara demokrasi dan prinsip moral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam melayani kepentingan publik dan kesiapan untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Melalui transparansi, hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat dibangun atas dasar kepercayaan, saling menghormati, dan kolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan transparansi harus terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, maupun media massa. Hanya dengan transparansi yang baik, pengelolaan keuangan publik dapat dilakukan secara akuntabel, efektif, dan efisien, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.1.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan keharusan bagi setiap individu maupun entitas organisasi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. Prinsip ini menuntut pimpinan atau pengelola organisasi untuk membuktikan serta menjelaskan seluruh hasil capaian kinerja dan tindakan operasional yang telah diambil secara transparan. Pada akhirnya, bentuk pertanggungjawaban tersebut wajib disampaikan kepada pihak atau otoritas berwenang yang memiliki hak legal untuk meminta serta menerima keterangan (Mulyadi dkk, 2018).

Menurut Nordiawan (2018), akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik baik finansial, manusia, maupun waktu kepada berbagai pemangku kepentingan melalui proses pelaporan, evaluasi, dan sanksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sosial, dan politik. Konsep ini melampaui sekadar formalitas administrasi menjadi budaya pertanggungjawaban yang menjamin setiap rupiah Dana Desa (rata-rata Rp1 miliar per desa per tahun) dialokasikan sesuai prioritas RKPDDes, dilaksanakan efisien, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik sah anggaran tersebut.

Bovens (2007) memformalkan akuntabilitas sebagai hubungan sosial antara actor (Kepala Desa) dan forum (masyarakat, BPD, Inspektorat) yang mencakup lima dimensi operasional yaitu :

1. Akuntabilitas vertikal kepada masyarakat melalui rapat umum desa dan LPJ publik.
2. Akuntabilitas horizontal antar instansi via koordinasi Camat-PMDes.
3. Akuntabilitas professional melalui audit BPK-RI dan Inspektorat Kabupaten.
4. Akuntabilitas politik kepada DPRD via evaluasi IDM (Indeks Desa Membangun).
5. Akuntabilitas administrative melalui Siskeudes yang terintegrasi Podes BPS.

Di Indonesia, dimensi-dimensi ini diimplementasikan melalui Permendagri No.20/2018 Pasal 25 yang mewajibkan pertanggungjawaban setiap triwulan dan tahunan, Permendes PD TT No.6/2022 tentang pengawasan internal oleh Bawasdes, serta UU No.1/2022 tentang hubungan keuangan pusat-daerah yang mengikat alokasi Dana Desa dengan capaian kinerja IDM.

Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976) menjadi landasan utama akuntabilitas, di mana Kepala Desa sebagai agen bertanggung jawab kepada masyarakat (principal) melalui mekanisme pengawasan berjenjang : BPD (tingkat desa) memverifikasi kesesuaian APBDes dengan aspirasi musrenbangdes, Bawasdes melakukan audit sosial proyek fisik, Inspektorat Kabupaten mengecek compliance BKUD/SP2D, dan BPK-RI mengaudit substantif temuan material (>5% anggaran).

2.1.3.1 Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas menurut Faizatul Wardah & Miftahol Horri (2025) yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan output atau outcome pada setiap dana desa : mengukur pergeseran paradigma penganggaran dari yang semula hanya berfokus pada penyerapan dana (*input-oriented*) menjadi berorientasi pada hasil nyata. Pengukurannya menitik beratkan pada kejelasan indikator keberhasilan fisik yang dihasilkan (misalnya panjang jalan yang dibangun) serta manfaat jangka panjang yang dirasakan masyarakat (misalnya peningkatan akses ekonomi akibat jalan tersebut).
2. Pelaporan realisasi dan pertanggungjawaban berbasis hasil : menilai kualitas dari dokumen pertanggungjawaban keuangan publik. Pengukurannya tidak hanya melihat aspek administratif seperti kesesuaian nota atau kuitansi transaksi belanja, melainkan mengevaluasi apakah laporan tersebut secara eksplisit menyajikan korelasi antara anggaran yang telah dihabiskan dengan tingkat keberhasilan capaian kinerja di lapangan.
3. Evaluasi kinerja perangkat desa dalam mengelola dana desa : berfokus pada aspek pengawasan internal dan kompetensi sumber daya manusia. Pengukurannya diarahkan pada ada atau tidaknya peninjauan sistematis terhadap kinerja para pamong/perangkat desa dalam menjalankan fungsi manajerial keuangan, guna mengidentifikasi hambatan operasional serta mendorong peningkatan kapasitas kerja secara berkelanjutan.

4. Sanksi administratif dan pidana jika laporan tidak tersampaikan atau terjadi penyimpangan : mengukur aspek penegakan aturan (*enforcement*) dan kepatuhan hukum (*compliance*). Keberadaan sanksi yang jelas, baik berupa penundaan pencairan dana tahap berikutnya (sanksi administratif) maupun konsekuensi hukum pidana bagi tindakan koruptif, berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk mencegah terjadinya penyimpangan moral (moral hazard) dalam birokrasi desa.

Indikator akuntabilitas berdasarkan dimensi Bovens (2007) dan Permendagri No.20/2018 yaitu sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa : kewajiban kepala desa secara formal menyampaikan laporan lengkap siklus anggaran (perencanaan-pelaksanaan-pertanggungjawaban) kepada forum resmi BPD, masyarakat, dan inspektorat dalam bentuk LPJ tahunan yang mencakup capaian fisik, finansial, dan dampak sosial.
2. Kepatuhan pada peraturan penggunaan dana : kesesuaian pengelolaan dana desa dengan hierarki regulasi UU No.6/2014, Permendagri No.20/2018, dan Permendes PDTT No.13/2020, bebas dari temuan material audit BPK/Inspektorat.
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran : pengawasan berkala oleh BPD, Bawasdes, dan masyarakat terhadap progress fisik-finansial dana desa melalui verifikasi lapangan, checklist progress, dan rapat evaluasi triwulan.

4. Pelaporan hasil penggunaan dana kepada masyarakat : penyampaian periodic SPJ triwulan dan LPJ tahunan dalam rapat umum desa yang dihadiri minimal 30% warga, disertai presentasi visual capaian.
5. Pengelolaan dana sesuai dengan perencanaan : keselarasan realisasi anggaran dengan RKPDDes/APBDes yang disusun melalui Musrenbangdes, dengan deviasi maksimal 105 per pos anggaran dan realokasi disetujui musyawarah.

Akuntabilitas merupakan prasyarat bagi terciptanya *good governance* yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, penegakan hukum, responsivitas, orientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta visi strategis. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas harus menjadi agenda prioritas dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Hanya dengan akuntabilitas yang kuat dan konsisten, pengelolaan keuangan publik dapat dilakukan secara bertanggung jawab, sumber daya publik dapat dimanfaatkan secara optimal, dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

2.1.4 Partisipatif Anggaran

Partisipatif anggaran merupakan salah satu mekanisme penting dalam pengelolaan keuangan publik yang memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses penyusunan, perencanaan, dan pengawasan anggaran pemerintah. Partisipatif anggaran bukan sekadar melibatkan masyarakat dalam forum-forum formal yang bersifat seremonial, melainkan memberikan peran substantif kepada masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan anggaran, mulai dari identifikasi masalah dan kebutuhan, penentuan prioritas program, alokasi anggaran, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Pendekatan ini mengubah paradigma penganggaran dari yang sebelumnya bersifat *top-down* dan elitis menjadi lebih demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

Menurut Bastian (2016), partisipasi masyarakat dalam penganggaran adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara konseptual, partisipatif anggaran memiliki beberapa dimensi penting yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, yaitu :

1. Dimensi politik, dimana partisipatif anggaran dipandang sebagai manifestasi dari prinsip demokrasi deliberatif yang memberikan hak kepada warga Negara untuk bersuara dan mempengaruhi kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup mereka. Melalui partisipasi dalam penganggaran, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam pembangunan.
2. Dimensi administratif, dimana partisipatif anggaran dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan melibatkan masyarakat yang memiliki pengetahuan lokal tentang kondisi, masalah, dan kebutuhan di wilayahnya,

pemerintah dapat menyusun program dan anggaran yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas masyarakat.

3. Dimensi sosial, dimana partisipatif anggaran berfungsi sebagai media pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Melalui keterlibatan dalam proses penganggaran, masyarakat belajar memahami kompleksitas pengelolaan keuangan publik, mengembangkan kemampuan bernegosiasi dan berargumentasi, serta membangun solidaritas sosial dalam memperjuangkan kepentingan bersama.

Bentuk dan mekanisme partisipatif anggaran dapat bervariasi tergantung pada konteks lokal, kapasitas pemerintah dan masyarakat, serta tingkat pemerintahan yang bersangkutan. Pada tingkat desa, partisipatif anggaran umumnya dilakukan melalui musyawarah desa atau musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Dalam forum ini, masyarakat dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan yang akan didanai dari APBDDes, mendiskusikan prioritas pembangunan, dan mengalokasikan anggaran untuk berbagai sektor. Pada tingkat kabupaten atau kota, partisipatif anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Selain itu, beberapa daerah juga mengembangkan mekanisme inovatif seperti forum warga, hearing publik, survei aspirasi masyarakat, atau platform online untuk mengumpulkan masukan masyarakat tentang anggaran. Dalam pelaksanaannya, partisipatif anggaran melibatkan berbagai tahapan mulai

dari sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang proses penganggaran, fasilitasi forum-forum partisipatif untuk penjangkaran aspirasi dan penyusunan usulan, kompilasi dan sinkronisasi usulan dari berbagai kelompok dan wilayah, pembahasan dan penetapan prioritas program dan alokasi anggaran, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara partisipatif.

Partisipatif anggaran memiliki peran yang sangat strategis dan bahkan menjadi prinsip dasar yang diamanatkan dalam regulasi tentang desa. Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya menekankan pentingnya musyawarah desa sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, termasuk dalam penyusunan APBDes. Dalam musyawarah desa, seluruh elemen masyarakat berhak hadir dan menyampaikan pendapat tentang rencana penggunaan dana desa dan sumber-sumber pendapatan desa lainnya. Pemerintah desa wajib memfasilitasi proses ini dengan menyelenggarakan musyawarah desa secara berkala, menyediakan informasi yang lengkap tentang kondisi keuangan desa, dan memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat termasuk perempuan dan kelompok marginal dapat berpartisipasi secara bermakna. Hasil musyawarah desa ini kemudian menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam menyusun RAPBDes yang akan dibahas dan ditetapkan bersama BPD. Mekanisme ini memastikan bahwa penggunaan dana desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program pembangunan desa, dan memperkuat pengawasan sosial terhadap pengelolaan keuangan desa.

2.1.4.1 Indikator Partisipatif Anggaran

Indikator partisipatif anggaran berdasarkan jurnal Nurul Arifin et al (2023) yaitu sebagai berikut :

1. Usulan rencana anggaran : keterlibatan aktif masyarakat atau perwakilan wilayah (seperti kepala dusun dan tokoh masyarakat) pada tahap awal perencanaan (*planning stage*). Pengukurannya menitikberatkan pada inisiatif warga dalam merumuskan dan menyampaikan usulan program kerja yang riil dan mendesak, sehingga pengalokasian anggaran bersifat bottom-up (dari bawah ke atas) dan bukan sekedar keputusan sepihak dari perangkat desa.
2. Keterlibatan langsung dalam rapat : partisipasi aktif di dalam ruang diskusi formal (seperti musyawarah desa atau Musrenbangdes). Pengukuran tidak hanya melihat daftar hadir secara administratif, melainkan mengevaluasi keterlibatan dinamis responden dalam memberikan pendapat, menyanggah, atau memberikan solusi alternative selama proses negosiasi dan finalisasi dokumen anggaran berlangsung.
3. Pengawasan : merujuk pada fungsi pengawasan masyarakat (*social control*). Pengukurannya difokuskan pada peran aktif warga maupun lembaga pengawas (seperti badan permusyawaratan desa/*tuha peut gampong*) dalam mengawal jalannya proyek pembangunan secara langsung untuk memastikan bahwa pengerjaan di lapangan berjalan konsisten dengan apa yang telah disepakati di dalam dokumen anggaran.
4. Pemberian penilaian terhadap pemerintah desa : berfokus pada tahap akhir dari siklus partisipasi (*feedback stage*). Pengukurannya menilai hak dan ruang

yang dimiliki oleh masyarakat untuk memberikan penilaian objektif, baik berupa apresiasi atas keberhasilan program maupun kritik terhadap program yang tidak berjalan optimal sebagai landasan perbaikan tata kelola pemerintahan desa pada periode anggaran berikutnya.

Indikator partisipatif anggaran berdasarkan teori *Participatory Governance* Fung & Wright (2003) dan Permendagri No.20/2018 Pasal 12 yaitu sebagai berikut:

1. Konsultasi publik sebelum penetapan anggaran : forum musyawarah terstruktur (Musrenbangdes) yang wajib dihadiri minimal 30% masyarakat desa untuk mengidentifikasi, mendiskusikan, dan menetapkan prioritas 3 program utama RKPDDes sebelum APBDDes disahkan BPD.
2. Transparansi proses perencanaan anggaran kepada masyarakat : keterbukaan informasi draft RKPDDes dan APBDDes melalui papan pengumuman, grup *WhatsApp* RT, dan sosialisasi dusun selama 14 hari sebelum persetujuan BPD, memungkinkan masukan public.
3. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam anggaran : fungsi legislatif desa yang memverifikasi kesesuaian APBDDes dengan aspirasi Musrenbangdes, menyetujui realokasi anggaran, dan mengawasi pelaksanaan melalui rapat evaluasi triwulanan.
4. Penyerapan aspirasi masyarakat terkait dengan anggaran : proporsi usulan warga Musrenbangdes (dusun/kelompok) yang terakomodasi dalam prioritas akhir RKPDDes/APBDDes, diukur sebagai rasio usulan diterima dengan total usulan.

5. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa : tingkat kehadiran dan partisipasi aktif warga dalam Musdus, Musdes, dan rapat evaluasi triwulanan, meliputi perempuan (10%), pemuda (5%), penyandang disabilitas (2%), dan kelompok ekonomi (5%).

Secara keseluruhan, partisipatif anggaran merupakan instrumen yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Melalui partisipatif anggaran, masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif dari kebijakan pemerintah, tetapi menjadi agen aktif yang ikut menentukan arah dan prioritas pembangunan. Partisipatif anggaran juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang didasarkan pada kepercayaan, komunikasi dan kolaborasi, bukan pada hubungan patronase atau subordinasi. Hanya dengan upaya yang konsisten dan sistematis, partisipatif anggaran dapat menjadi praktik yang terinstitusionalisasi dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan demokrasi di Indonesia.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai pengelolaan dana desa telah banyak dilakukan dan menjadi perhatian penting seiring meningkatnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Efektivitas pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam proses penganggaran.

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dan persamaan antara hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Editya Rangga Pratama & Hurian Kamela (2025) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Kuantitatif Pada Kecamatan Sekupang” menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kecamatan Sekupang. Melalui analisis kuantitatif, ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan, semakin baik pula kinerja keuangan yang dicapai oleh pemerintah daerah. Demikian pula dengan akuntabilitas, yang terbukti berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Hasil uji statistik menunjukkan korelasi positif antara kedua variabel independen tersebut dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, mengindikasikan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sangat diperlukan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang optimal.

Penelitian Kurniawan & 2 Dewi Putriani (2022) yang berjudul "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipatif Anggaran Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Islam" dengan studi kasus pada Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa selama masa pandemi Covid-19. Dari perspektif Islam, ketiga prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai syariah yang mengutamakan keterbukaan (transparansi),

pertanggungjawaban (akuntabilitas), dan musyawarah (partisipasi) dalam pengelolaan keuangan publik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut di Desa Srikaton mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk program-program penanggulangan dampak pandemi, sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian Ayu Yusnida & Anindya Pangestika (2024) dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Se-Kecamatan Bumijawa" menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di wilayah Kecamatan Bumijawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas aparat desa dalam mengelola dana, semakin transparan informasi keuangan yang disampaikan kepada masyarakat, dan semakin aktif partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, maka pengelolaan dana desa akan semakin baik dan tepat sasaran. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial yang dapat mencegah penyalahgunaan dana desa dan memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian Aswir & Misbah (2021) yang berjudul "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Kab.Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020" menunjukkan bahwa akuntabilitas,

transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Gantarang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana desa kepada masyarakat, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini menekankan bahwa ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan harus diterapkan secara bersamaan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik, mencegah terjadinya penyimpangan dana, serta memastikan bahwa alokasi dana desa benar-benar digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bulukumba.

Penelitian Putriani (2021) dengan judul "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipatif Anggaran Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)" menemukan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, khususnya dalam konteks masa pandemi Covid-19. Dari perspektif Islam, penelitian ini menganalisis bagaimana ketiga prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai syariah seperti amanah (kepercayaan), sidiq (kejujuran), dan musyawarah dalam pengelolaan keuangan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Srikaton, penerapan transparansi dalam penyampaian informasi penggunaan dana, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban keuangan, dan pelibatan masyarakat dalam proses

penganggaran telah meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa untuk program-program penanggulangan dampak pandemi. Penelitian ini menekankan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik tidak hanya penting dari perspektif administratif, tetapi juga memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan harta umat.

Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Kuantitatif Pada Kecamatan Sekupang (Editya Rangga Pratama & Hurian Kamela, 2025)	Kuantitatif, survei menggunakan kuisioner, analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Sekupang	Variabel transparansi dan akuntabilitas. Menggunakan metode penelitian kuantitatif	Tidak menggunakan variabel partisipatif anggaran dan variabel efektivitas. Terdapat variabel kinerja keuangan pemerintah. Lokasi penelitian berbeda
2	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipatif Anggaran Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu) (Kurniawan & 2 Dewi Putriani, 2022)	Kuantitatif dengan pendekatan asosiatif	Transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa	Variabel transparansi, akuntabilitas, partisipatif anggaran, dan efektivitas pengelolaan dana desa. Menggunakan metode penelitian kuantitatif	Menggunakan perspektif Islam. Konteks waktu pada masa pandemi covid-19. Lokasi penelitian berbeda

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa SeKecamatan Bumijawa (Ayu Yusnida & Anindya Pangestika, 2024)	Kuantitatif dengan analisis regresi berganda	Variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa di lokasi tersebut	Menggunakan variabel akuntabilitas, dan transparansi. Fokus utama pada pengelolaan dana desa. Menggunakan metode penelitian kuantitatif	Tidak meneliti variabel efektivitas. Lokasi penelitian berbeda
4	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Kab.Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Aswir & Misbah, 2021)	Kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda dan metode sampling jenuh	Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada pemerintah desa Kecamatan Gantarang tahun 2020	Variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas pengelolaan	Tidak meneliti variabel efektivitas dan fokus spesifik pada alokasi dana desa (ADD). Lokasi penelitian berbeda
5	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipatif Anggaran Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten	Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif	Variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa menurut perspektif ekonomi Islam	Variabel transparansi, akuntabilitas, partisipatif anggaran, dan efektivitas pengelolaan dana desa. Menggunakan metode penelitian kuantitatif	Menggunakan perspektif Islam. Konteks waktu masa pandemi covid-19. Lokasi penelitian berbeda

	Pringsewu) (Putriani, 2021)				
--	--------------------------------	--	--	--	--

2.3 Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Transparansi (X1) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana (Y)

Transparansi memiliki hubungan yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran, proses pengadaan, dan pelaporan keuangan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara jelas bagaimana dana desa dialokasikan dan digunakan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengawasi jalannya program pembangunan dan memberikan masukan apabila terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian Editya & Kamela (2025) mengonfirmasi pengaruh dominan transparansi pada kinerja keuangan serupa.

Dengan adanya keterbukaan informasi, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran karena didasarkan pada data dan fakta yang akurat. Oleh karena itu, transparansi menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap pencapaian efektivitas dalam pengelolaan dana.

2. Hubungan Akuntabilitas (X2) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana (Y)

Akuntabilitas berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa karena mengharuskan aparat desa untuk bertanggung

jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam mengelola anggaran. Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban administratif, keuangan, dan moral atas penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi. Ketika aparat desa menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik, mereka akan lebih berhati-hati dan profesional dalam mengelola dana, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Penelitian Ahmad (2025) mengonfirmasi akuntabilitas berpengaruh simultan terhadap efektivitas dana desa via pelaporan tepat waktu.

Akuntabilitas yang kuat mendorong terciptanya budaya integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, akuntabilitas juga memfasilitasi proses evaluasi dan audit yang lebih efektif, sehingga penyimpangan dapat terdeteksi dan dicegah sejak dini. Dengan demikian, akuntabilitas memegang peranan vital dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan dana yang optimal.

3. Hubungan Partisipatif Anggaran (X3) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana (Y)

Partisipatif anggaran atau keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan dana desa memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Keterlibatan

masyarakat dalam musyawarah desa dan forum-forum perencanaan anggaran memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran. Selain itu, partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang dapat mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan akuntabilitas aparat desa. Penelitian Adikawuah (2024) menunjukkan partisipasi dominan meningkatkan efektivitas dana desa saat pandemic melalui musyawarah desa.

Melalui partisipasi, informasi yang lebih lengkap dan beragam dapat dikumpulkan, sehingga alokasi dana menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas yang sebenarnya. Selain itu, partisipatif anggaran juga meningkatkan rasa memiliki dan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan program, yang pada akhirnya berkontribusi pada efektivitas penggunaan dana. Dengan demikian, pendekatan partisipatif dalam penganggaran menjadi salah satu kunci untuk mencapai pengelolaan dana yang lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Hubungan Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Partisipatif Anggaran (X3) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana (Y)

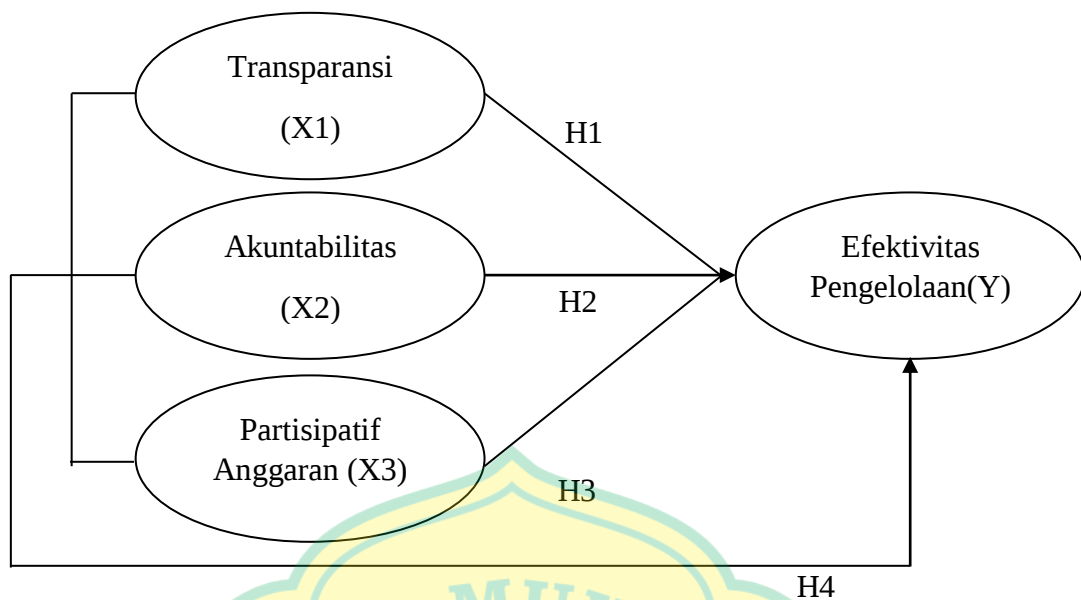
Secara simultan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran memiliki hubungan yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Ketiga prinsip ini membentuk sistem tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*) yang memastikan bahwa dana desa dikelola secara profesional,

efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Transparansi menciptakan keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dana, akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan, dan partisipatif anggaran memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian Ahmad (2025) menunjukkan pengaruh simultan signifikan variable transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif terhadap efektivitas dana desa.

Ketika ketiga variabel ini diterapkan secara bersamaan, akan tercipta sistem pengelolaan dana yang komprehensif, di mana transparansi dan akuntabilitas saling memperkuat, sementara partisipasi memastikan bahwa proses tersebut inklusif dan responsif. Oleh karena itu, untuk mencapai pengelolaan dana yang benar-benar efektif, ketiga aspek ini harus diintegrasikan dan diimplementasikan secara konsisten dalam seluruh proses pengelolaan keuangan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel transparansi (X1), akuntabilitas (X2), dan partisipatif anggaran (X3) dengan variable Efektivitas pengelolaan dana desa (Y) di Kecamatan Banda Raya periode 2024. Berikut merupakan gambaran kerangka pemikiran untuk memahami hubungan antar variabel dalam penelitian ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Pengembangan dari penelitian terdahulu (Dewi Putriani, 2021)

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka pemikiran di atas, maka rumusan hipotesis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- H1 : Diduga transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya periode 2024
- H2 : Diduga akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya periode 2024
- H3 : Diduga partisipatif anggaran berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya periode 2024
- H4 : Diduga transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya periode 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya periode 2024. Secara spesifik, penelitian ini berupaya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen (transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran) secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, serta menguji pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan.

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif kausal dipilih karena bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel independen (transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran) dengan variabel dependen (efektivitas pengelolaan dana desa). Pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengukur variabel-variabel penelitian secara sistematis dan objektif melalui instrumen kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode statistik inferensial untuk menguji hipotesis penelitian dan mengetahui tingkat signifikansi pengaruh antar

variabel. Penelitian ini bersifat eksplanatif, yaitu menjelaskan hubungan kausal antar variabel berdasarkan teori dan kerangka konseptual yang telah dibangun. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan temuan yang terukur, dapat digeneralisasi, dan memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa. Metode penelitian kuantitatif juga memungkinkan dilakukannya pengujian statistik seperti uji regresi linear berganda untuk mengetahui besaran pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan.

3.1.3 Horizon Waktu

Horizon waktu dalam penelitian ini merupakan rentang waktu pengumpulan dan pengamatan data untuk mengukur pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya periode 2024. Berikut merupakan rentang waktu selama kegiatan penelitian :

Tabel 3.1 Horizon Waktu

Keterangan	September 2025	Januari 2026	Februari 2026	Maret 2026	Juni 2026	Agustus 2026
Pengajuan Judul						
Survei Lokasi Penelitian						
Penyusunan Proposal						
Seminar Proposal						
Pengolahan Data						
Penyusunan Skripsi						
Bimbingan Skripsi						
Ujian Komprehensif						

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan atau objek yang menjadi fokus penelitian dan dari mana data dikumpulkan serta dianalisis. Menurut Neuman (2014), unit analisis merupakan elemen dasar yang harus didefinisikan dengan jelas pada tahap awal penelitian untuk memastikan konsistensi dalam pengumpulan dan analisis data.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu aparatur desa dan masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya. Responden penelitian terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), serta perwakilan masyarakat yang aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pemilihan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan bahwa individu-individu tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Mereka merupakan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi akurat mengenai tingkat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, serta dapat menilai efektivitas pengelolaan dana tersebut. Data dikumpulkan dari masing-masing individu responden melalui kuesioner terstruktur yang mengukur persepsi dan penilaian mereka terhadap variabel-variabel penelitian. Dengan menggunakan unit analisis individu, penelitian ini dapat menangkap variasi perspektif dan pengalaman dari berbagai individu yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, sehingga analisis yang dilakukan dapat lebih

komprehensif dan representatif. Populasi penelitian mencakup seluruh desa yang berada di wilayah Kecamatan Banda Raya, dengan teknik sampling yang disesuaikan untuk memastikan keterwakilan dari berbagai karakteristik desa yang ada.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh aparat pemerintahan desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya periode 2024. Populasi mencakup aparatur desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dari 10 desa yang berada di wilayah Kecamatan Banda Raya. Jumlah desa di Kecamatan Banda Raya menjadi dasar penentuan populasi, di mana setiap desa memiliki struktur pemerintahan dan mekanisme partisipasi masyarakat yang serupa dalam pengelolaan dana desa. Populasi dipilih berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan terkait variabel-variabel penelitian. Berikut merupakan jumlah populasi di 10 desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya :

Tabel 3.2 Populasi Penelitian

No	Nama Desa	Jumlah Populasi	Sampel
1	Geuceu Iniem	22	7
2	Geuceu Kayee Jato	21	7
3	Geuceu Komplek	19	6
4	Lam Ara	22	7
5	Lampuot	23	7
6	Lamlagang	22	7
7	Lhong Cut	21	7
8	Lhong Raya	25	7
9	Mibo	22	7
10	Peunyeurat	16	6
Total		213	68

3.2.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2016), sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar di teliti untuk memperoleh kesimpulan mengenai populasi. Mengingat jumlah populasi yang sudah diketahui secara pasti, maka penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin.

Adapun rumus Slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

E : tingkat kesalahan (margin of error)

Dengan margin of error atau tingkat kesalahan maksimal sebesar 10% (0,1).

Berdasarkan rumus di atas, maka perhitungan jumlah minimal sampel dalam penelitian ini yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N(0,1^2)}$$

$$n = \frac{213}{1 + 213(0,01)}$$

$$n = 68$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang di ambil dalam penelitian ini sebanyak 68 responden dari jumlah populasi yang terdapat di 10 desa kecamatan Banda Raya (Geuceu Iniem, Geuceu Kayee Jato, Geuceu Komplek, Lam Ara, Lampeuot, Lamlagang, Lhong Cut, Lhong Raya, Mibo, Peunyeurat). Responden yang diambil dalam penelitian ini yaitu sekretaris desa, KAUR keuangan, KAUR umum, KASI pemerintahan, KASI pembangunan & kesra, kasi pelayanan, dan staff

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek atau tempat dari mana data penelitian diperoleh, dan pemilihan sumber data yang tepat sangat menentukan kualitas dan validitas hasil penelitian. Dalam penelitian tentang efektivitas pengelolaan dana desa, sumber data dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama yaitu data primer dan data sekunder, yang masing-masing memiliki karakteristik

dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui interaksi langsung antara peneliti dengan subjek penelitian. Sumber data primer penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa yang terdiri dari keuchik dan perangkat desa (Sekretaris, Bendahara, dan Kasi), serta unsur pengawas yaitu *Tuha Peut Gampong* (TPG) di 9 desa kecamatan Banda Raya sebagai representasi masyarakat. Mereka merupakan narasumber yang dapat memberikan informasi mendalam tentang praktik transparansi dalam penyampaian informasi anggaran, mekanisme akuntabilitas dalam pertanggungjawaban penggunaan dana, proses partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan hingga pelaksanaan program, serta efektivitas program-program yang dilaksanakan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara, biasanya berupa data yang sudah tersedia dan telah dikumpulkan serta didokumentasikan oleh pihak lain sebelumnya. Meskipun bersifat tidak langsung, data sekunder memiliki peran penting dalam memperkuat dan melengkapi data primer serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup berbagai dokumen resmi dan publikasi yang relevan.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana desa periode 2024 merupakan sumber data sekunder utama yang memberikan informasi tentang realisasi penggunaan dana dan pencapaian program. Dokumen APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Kecamatan Banda Raya menyediakan informasi tentang perencanaan anggaran dan alokasi dana untuk berbagai program pembangunan. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana desa seperti Permendagri dan Permendes PDTT merupakan landasan normatif yang mengatur standar dan prosedur dalam pengelolaan dana desa. Literatur ilmiah berupa jurnal, buku, dan penelitian terdahulu memberikan kerangka teoretis dan komparatif yang memperkaya analisis penelitian.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa pemilihan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan jenis penelitian, karakteristik responden, dan sumber data yang tersedia. Dalam penelitian mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, diperlukan kombinasi berbagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan dapat diverifikasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Kuisioner, merupakan instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyajikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai dengan persepsi, pengalaman, atau pengetahuan mereka. Teknik ini sangat efisien untuk penelitian kuantitatif yang melibatkan jumlah responden yang besar karena memungkinkan standarisasi pertanyaan dan kemudahan dalam analisis statistik. Dalam penelitian ini, kuesioner dirancang secara sistematis untuk mengukur berbagai aspek yang menjadi variabel penelitian. Untuk mengukur persepsi dan sikap responden, kuisioner menggunakan skala likert dengan gradasi jawaban sebagai berikut :

Tabel 3.3 Skala pengukuran

No	Alternatif Jawaban	Skala/Bobot
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2	Tidak Setuju (TS)	2
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Setuju (S)	4
5	Sangat Setuju (SS)	5

2. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Arikunto (2013) menjelaskan bahwa dokumentasi mencakup pencarian data mengenai hal-hal atau variabel penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi memiliki kelebihan karena data yang dikumpulkan bersifat stabil, tidak

berubah seiring waktu, dan dapat ditelusuri kembali untuk verifikasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup berbagai jenis dokumen yang memberikan bukti tertulis tentang pengelolaan dana desa. Pertama, dokumen APBDesa periode 2024 merupakan sumber informasi tentang alokasi anggaran untuk berbagai bidang pembangunan, proporsi penggunaan dana untuk program prioritas, dan kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi anggaran. Kedua, laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan dana desa memberikan informasi tentang realisasi keuangan, capaian program, kendala yang dihadapi, dan tindak lanjut yang direncanakan.

3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan proses menerjemahkan konsep atau variabel penelitian yang bersifat abstrak menjadi indikator-indikator yang dapat diukur dan diamati secara empiris. Dalam penelitian ini, operasionalisasi variabel melibatkan beberapa variabel yaitu transparansi (X1), akuntabilitas (X2), partisipatif anggaran (X3), serta transparansi (Y). Berikut merupakan tabel definisi dan operasionalisasi variabel :

Tabel 3.4 Definisi dan Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Variabel Dependen				
1	Efektivitas (Y)	Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin	1. Capaian target program 2. Efisiensi penggunaan anggaran	Skala Likert

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
		besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan (Mahmudi, 2015:143)	3. Ketepatan waktu pelaksanaan program 4. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil program 5. Pengurangan penyelewengan dan penyimpangan dana	
Variabel Independen				
2	Transparansi (X1)	Transparansi adalah prinsip keterbukaan	1. Keterbukaan informasi penggunaan dana	Skala Likert
		yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Nordiawan, 2010:152)	2. Publikasi laporan keuangan 3. Akses masyarakat terhadap data anggaran 4. Proses pengambilan keputusan yang jelas 5. Pelaporan realisasi anggaran secara rutin	
3	Akuntabilitas (X2)	Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta	1. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa 2. Kepatuhan pada peraturan penggunaan dana 3. Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran 4. Pelaporan hasil penggunaan dana kepada masyarakat 5. Pengelolaan dana sesuai dengan perencanaan	Skala Likert

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
		pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:20)		
4	Partisipatif Anggaran (X3)	Partisipasi anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh individu dalam proses penganggaran yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian anggaran (Bastian, 2010:389)	1. Konsultasi publik sebelum penetapan anggaran 2. Transparansi proses perencanaan anggaran kepada masyarakat 3. Peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam anggaran 4. Penyerapan aspirasi masyarakat terkait dengan anggaran 5. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa	Skala Likert

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda (*multiple linear regression*) untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik ini dipilih karena penelitian ini melibatkan lebih dari satu variabel independen (transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran) yang diduga mempengaruhi satu variabel dependen (efektivitas pengelolaan dana desa). Menurut Sugiyono (2019), analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial. Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y = Efektivitas

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi

X_1 = Transparansi

X_2 = Akuntabilitas

X_3 = Partisipatif Anggaran

e = Error

3.6 Pengujian Data

3.6.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian (kuesioner) mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Ghozali (2018), validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat mengukur konstruk atau konsep yang dimaksudkan untuk diukur. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan terhadap setiap item pertanyaan dalam kuesioner yang mengukur variabel transparansi, akuntabilitas, partisipatif anggaran, dan efektivitas pengelolaan dana desa. Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan secara statistic, yaitu dengan menggunakan uji *Corrected Item-Total Correlation* dengan bantuan program SPSS.

- Suatu item pertanyaan dinyatakan valid jika nilai korelasi r hitung lebih besar dari r tabel pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), atau jika nilai signifikansi (p -value) kurang dari 0,05.
- Jika r hitung $> r$ tabel (misalnya r tabel = 0,235 untuk $n = 68$), item dianggap mampu mengukur variabel dengan baik.
- Item yang memiliki nilai r hitung kurang dari r tabel dinyatakan tidak valid.

Menurut Sugiyono (2019), item pertanyaan yang tidak valid harus dikeluarkan dari analisis atau direvisi karena tidak mampu mengukur konstruk yang dimaksudkan. Proses pengujian validitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap indikator yang digunakan dalam penelitian benar-benar relevan dan mampu merepresentasikan variabel yang diukur, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi riil yang sebenarnya.

3.6.2 Uji Reabilitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur konsistensi internal dari instrumen penelitian. Reliabilitas merujuk pada sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten jika dilakukan pengukuran berulang terhadap subjek yang sama dengan kondisi yang sama. Menurut Sekaran dan Bougie (2016), reliabilitas menunjukkan stabilitas dan konsistensi instrumen dalam mengukur konsep dan membantu menilai kualitas pengukuran. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*, yang merupakan teknik yang paling banyak digunakan dalam penelitian sosial. Suatu variabel atau konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha*

lebih besar dari 0,70, meskipun menurut Nunnally (1978) dalam Hair *et al.* (2014), nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60 masih dapat diterima untuk penelitian eksploratori. Nilai *Cronbach's Alpha* yang tinggi menunjukkan bahwa item-item pertanyaan dalam kuesioner memiliki konsistensi internal yang baik dan dapat dipercaya untuk mengukur variabel penelitian. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk setiap variabel penelitian secara terpisah, yaitu variabel transparansi, akuntabilitas, partisipatif anggaran, dan efektivitas pengelolaan dana desa. Jika ditemukan item pertanyaan yang menurunkan nilai reliabilitas, maka item tersebut akan dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari analisis setelah dilakukan evaluasi substansif terhadap relevansinya dengan konstruk yang diukur.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen memenuhi syarat statistik yang diperlukan. Pengujian ini umumnya meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan bila relevan uji autokorelasi, sehingga model regresi yang dihasilkan bebas dari pelanggaran asumsi dan dapat memberikan estimasi koefisien yang tepat serta kesimpulan yang valid.

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual (*error*) memiliki distribusi normal. Menurut Ghozali (2018), data yang berdistribusi normal akan menghasilkan estimasi parameter yang lebih akurat dan pengujian hipotesis yang lebih valid. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dan analisis grafik Normal P-P Plot. Kriteria pengujian *Kolmogorov-Smirnov* adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data residual berdistribusi normal. Sementara pada grafik Normal P-P Plot, data dikatakan berdistribusi normal jika titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Menurut Gujarati dan Porter (2009), multikolinearitas dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil dan standar error menjadi sangat besar, sehingga mengurangi ketepatan hasil analisis. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kriteria yang digunakan adalah jika nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Jika ditemukan adanya multikolinearitas, maka perlu dilakukan tindakan korektif seperti

mengeluarkan salah satu variabel yang berkorelasi tinggi atau melakukan transformasi data.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik seharusnya terjadi homoskedastisitas, yaitu variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain bersifat tetap. Menurut Nachrowi dan Usman (2006), heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien dan pengujian hipotesis menjadi tidak valid. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser* dan analisis grafik *scatterplot*. Pada uji *Glejser*, heteroskedastisitas tidak terjadi jika nilai signifikansi variabel independen terhadap nilai absolut residual lebih besar dari 0,05. Sementara pada grafik *scatterplot*, heteroskedastisitas tidak terjadi jika titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu yang jelas.

3.7 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara statistik pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya periode 2024 menggunakan regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.

Pengujian melibatkan uji t (parsial), uji F (simultan), koefisien korelasi (R), serta koefisien determinasi (R^2).

3.7.1 Uji t (Parsial)

Uji t (parsial) digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen (transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran) secara individual terhadap variabel dependen (efektivitas pengelolaan dana desa). Melalui uji t, dapat diketahui apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada tingkat signifikansi tertentu, biasanya 5% atau 0,05. Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima yang berarti variabel tersebut berpengaruh signifikan secara parsial. Sebaliknya, jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak yang berarti variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan secara parsial.

H_{o1} : Transparansi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya

H_{a1} : Transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya

H_{o2} : Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya

H_{a2} : Akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya

H₀₃ : Partisipatif anggaran tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya

H_{a3} : Partisipatif anggaran berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya

3.7.2 Uji f (Simultan)

Uji f (simultan) digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen (transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (efektivitas pengelolaan dana desa). Uji F simultan bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan sudah layak atau fit dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yang berarti model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk menjelaskan pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H_0 : Transparansi, akuntabilitas dan partisipatif anggaran secara simultan tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya

H_a : Transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya

3.7.3 Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi (R) digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 hingga +1, dimana nilai mendekati +1 menunjukkan hubungan positif yang kuat, nilai mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat, dan nilai mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah atau tidak ada hubungan. Dalam penelitian ini, koefisien korelasi akan menunjukkan seberapa kuat hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran dengan efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya. Semakin tinggi nilai koefisien korelasi, semakin kuat hubungan antara variabel-variabel tersebut.

3.7.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi atau perubahan dalam variabel dependen (efektivitas pengelolaan dana

desa) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran). Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1 atau dalam persentase 0% hingga 100%. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Misalnya, jika nilai R^2 adalah 0,75 atau 75%, maka 75% variasi efektivitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran, sedangkan 25% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Koefisien determinasi memberikan gambaran tentang *goodness of fit* dari model regresi yang digunakan dalam penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Banda Raya

Kecamatan Banda Raya merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah kota Banda Aceh, provinsi Aceh, Indonesia yang di pimpin oleh bapak Drs. Rahmat Kadafi MM. Kantor kecamatan Banda Raya terletak di Jl.Wedana Gampong Lam Ara. Kecamatan ini memiliki luas 478,90 hektar atau 4,79 kilometer persegi. Secara administrative, kecamatan Banda Raya terbagi menjadi 10 gampong (desa) yaitu Geuceu Iniem, Geuceu Kayee Jato, Geuceu Komplek, Lam Ara, Lampeuot, Lamlagang, Lhong Cut, Lhong Raya, Mibo, dan Peunyeurat. Batas wilayah kecamatan Banda Raya meliputi kecamatan Baiturrahman di sebelah Utara, kecamatan Lueng Bata di sebelah Timur, kecamatan Jaya Baru di sebelah Barat, serta kecamatan Darul Imarah di sebelah Selatan.

Desa Lhong Raya merupakan wilayah terluas dengan cakupan 0,996 km² atau sekitar 20,80% dari total luas kecamatan. Sebaliknya, desa Lampeuot merupakan wilayah terkecil dengan luas hanya sebesar 0,180 km² atau setara dengan 3,76% dari total wilayah kecamatan Banda Raya. Jarak masing-masing kantor keuchik (desa) ke ibukota kecamatan berkisar antara 1 hingga 2 kilometer, sementara jarak menuju ibukota Banda Aceh bekisar antara 3 hingga 5 kilometer, menunjukkan tingkat aksesibilitas wilayah yang sangat baik.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2024, kecamatan Banda Raya memiliki total populasi sebanyak 27.219 jiwa, dengan komposisi gender yang relatif seimbang yaitu 13.501 jiwa laki-laki dan 13.718 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk di tingkat kecamatan mencapai rata-rata 5.684 jiwa/km². Desa Lamlagang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 5.045 jiwa (18,53% dari total populasi kecamatan) sekaligus menjadi wilayah terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai 8.298 jiwa/km². Sementara itu, jumlah kepala keluarga (KK) yang tercatat di seluruh kecamatan adalah sebanyak 7.999 KK, di mana Lamglagang memiliki jumlah keluarga terbanyak (1.507 KK) dan Lampeutot memiliki jumlah terkecil (285 KK).

Dalam hal struktur pemerintahan desa, setiap desa dipimpin oleh seorang keuchik dan didukung penuh oleh sekretaris desa serta jajaran aparat desa lainnya. Total aparat desa di kecamatan Banda Raya tercatat sebanyak 10 orang sekretaris desa, 10 keuchik, dan 41 kepala dusun. Seluruh desa di kecamatan ini juga telah memiliki Badan Permusyawaratan Desa (*Tuha Peut Gampong*) yang aktif. Sepanjang tahun 2024, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terlihat dari terlaksananya 98 kegiatan musyawarah desa di tingkat kecamatan, dengan frekuensi tertinggi berada di desa Geuceu Kayee Jato sebanyak 19 kali kegiatan. Selain itu, gunda mendukung kemandirian ekonomi desa, terdapat total 19 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif di seluruh kecamatan, di mana desa Geuceu Kayee Jato mengelola unit BUMDes terbanyak (8 unit).

4.2 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 68 aparatur desa yang terlibat langsung dalam siklus pengelolaan anggaran di 10 desa yang berada di wilayah kecamatan Banda Raya. Karakteristik responden dapat diklasifikasikan atas jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, asal desa, dan jabatan.

Tabel 4.1
Distribusi Responden

No.	Jabatan	Jumlah
1	Sekretaris Desa	10
2	KAUR Keuangan	10
3	KAUR Umum	10
4	KASI Pemerintahan	10
5	KASI Pembangunan&Kesra	10
6	KASI Pelayanan	10
7	Staff	8
Jumlah Keseluruhan		68

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Analisis karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai profil demografi subjek yang terlibat dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian ini data mengenai jumlah dan persentase responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki-laki	42	61.8
Perempuan	26	38.2
Jumlah	68	100.0

Sumber : Data Primer (diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 4.X di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 42 orang atau sebesar 61,8%. Sementara itu, responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 26 orang atau sebesar 38,2%. Hal ini menunjukkan bahwa subjek penelitian didominasi oleh kelompok laki-laki.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden dalam penelitian ini juga dikelompokkan berdasarkan usia. Pengelempokan ini bertujuan untuk melihat sebaran kelompok umur responden yang menjadi sampel penelitian serta memberikan pemahaman mengenai latar belakang kedewasaan subjek. Data mengenai jumlah dan persentase karakteristik responden berdasarkan kelompok usia disajikan pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
20-30	4	5.9
31-40	22	32.4
41-50	33	48.5
> 50	9	13.2
Jumlah	68	100.0

Sumber : Data primer (diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, terlihat bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini tersebar ke dalam empat kelompok usia. Responden terbanyak berada pada kelompok usia 41-50 tahun, yaitu sebanyak 33 orang atau

sebesar 48,5%. Diikuti oleh kelompok usia 31-40 tahun sebanyak 22 orang (32,4%), dan kelompok usia di atas 50 tahun sebanyak 9 orang (13,2%). Sementara itu, jumlah responden paling sedikit berada pada kelompok usia muda 20-30 tahun, yaitu hanya sebanyak 4 orang atau sebesar 5,9%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berada pada rentang usia produktif yang matang.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pengelompokan karakteristik responden dalam penelitian ini juga ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan terakhir. Faktor pendidikan terakhir ini dirasa penting untuk memberikan deskripsi mengenai tingkat pemahaman, latar belakang kognitif, serta kapasitas responden dalam menerima dan menjawab instrumen penelitian. Distribusi data mengenai jumlah dan persentase responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir disajikan dalam Tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase (%)
SMA/Sederajat	17	25.0
D-III	13	19.1
S1	35	51.5
S2	2	2.9
S3	1	1.5
Jumlah	68	100.0

Sumber : Data primer (diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, diketahui bahwa tingkat pendidikan terakhir responden sangat bervariasi mulai dari tingkat menengah atas hingga

pascasarjana. Mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1, yaitu sebanyak 35 orang atau sebesar 51,5%. Disusul oleh kelompok responden dengan pendidikan terakhir SMA/Sederajat sebanyak 17 orang (25,0%), dan Diploma III (D-III) sebanyak 13 orang (19,1%). Sementara itu, responden dengan latar belakang pendidikan pascasarjana memiliki proporsi terkecil, dengan lulusan S2 sebanyak 2 orang (2,9%) dan lulusan S3 sebanyak 1 orang (1,5%).

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Desa

Guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sebaran geografis wilayah asal subjek penelitian, dilakukan pengelompokan karakteristik responden berdasarkan nama desa tempat tinggal. Pengelompokan sebaran demografi ini penting dilakukan untuk memastikan keterwakilan data sampel dari tiap-tiap wilayah di lokasi penelitian. Adapun rincian mengenai jumlah dan persentase sebaran responden berdasarkan nama desa disajikan dalam Tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Desa

Nama Desa	Jumlah Responden	Persentase (%)
Geuceu Kayee Jato	7	10.3
Geuceu Iniem	7	10.3
Geuceu Komplek	6	8.8
Lamlagang	7	10.3
Lam Ara	7	10.3
Lampeuot	7	10.3
Lhong Cut	7	10.3
Lhong Raya	7	10.3
Mibo	7	10.3
Peunyeurat	6	8.8
Jumlah	68	100.0

Sumber : Data primer (diolah, 2026)

Berdasarkan pada penyajian data karakteristik responden pada Tabel 4.5, sebaran wilayah asal responden terdistribusi secara relatif dan cukup seimbang dari total 68 responden yang tersebar di 10 desa. Proporsi perwakilan sampel dari delapan desa (Geuceu Kayee Jato, Geuceu Iniem, Lamlagang, Lam Ara, Lampeuot, Lhong Cut, Lhong Raya, dan Mibo) berada pada angka yang setara, yaitu 10,3% per desa, disusul perwakilan minoritas dari dua desa tersisa sebesar 8,8%. Distribusi yang merata dan proporsional ini mengindikasikan bahwa hasil pengumpulan data melalui instrumen kuesioner terhindar dari bias dominasi satu wilayah tertentu, sehingga data yang diperoleh dapat dinilai representatif untuk mewakili populasi di seluruh lokasi penelitian.

4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Karakteristik responden selanjutnya dikelompokkan berdasarkan jabatan atau posisi struktural di instansi tempat penelitian. Pengelempokan ini ditujukan

untuk memberikan gambaran mengenai keragaman peranan kerja serta keterwakilan aparatur dari berbagai lini struktural organisasi dalam memberikan respon terhadap instrumen penelitian. Data deskriptif mengenai jumlah dan persentase sebaran responden menurut jabatan dijabarkan pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarjan Jabatan

Jabatan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Sekretaris Desa	10	14.7
KAUR Keuangan	10	14.7
KAUR Umum	10	14.7
KASI Pemerintahan	10	14.7
KASI Pembangunan&Kesra	10	14.7
KASI Pelayanan	10	14.7
Staff	8	11.8
Jumlah	68	100.0

Sumber : Data primer (diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa sebaran jabatan responden memperlihatkan tingkat keterwakilan yang sangat baik dari seluruh elemen aparatur desa. Sebanyak enam posisi jabatan strategis (Sekretaris Desa, KAUR Keuangan, KAUR Umum, KASI Pemerintahan, KASI Pembangunan & Kesra, dan KASI Pelayanan) masing-masing memberikan kontribusi sampel sebesar 14,7%, disusul oleh kelompok Staff sebesar 11,8%. Distribusi data yang didominasi oleh unsur pimpinan teknis (Kepala Urusan dan Kepala Seksi) serta Sekretaris Desa ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden merupakan pemangku kebijakan operasional yang memahami dengan baik alur tata kelola di

lokasi penelitian. Hal ini diharapkan dapat memberikan bobot jawaban kuesioner yang kredibel, valid, dan representatif.

4.3 Hasil Pengujian Data

4.3.1 Uji Validitas Instrumen

Uji validitas instrumen dilakukan untuk mengetahui sejauh mana butir-butir pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel penelitian dengan tepat dan akurat. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai *Corrected Item-Total Correlation* (r hitung) dari masing-masing pernyataan dengan nilai r tabel pada taraf signifikansi 5%. Berdasarkan distribusi statistik, nilai r tabel untuk sampel sebanyak 70 orang adalah sebesar 0,235. Suatu instrumen atau butir pernyataan dinyatakan valid apabila memiliki nilai koefisien korelasi (r hitung) yang lebih besar dari nilai r tabel (0,235). Rincian hasil pengujian validitas untuk keseluruhan variabel penelitian disajikan pada Tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas

No Item Pertanyaan		Variabel	Koefisien Korelasi	Nilai r- tabel (N=70)	Keterangan
1	A1	Y	0,473	0,235	Valid
2	A2		0,454	0,235	Valid
3	A3		0,641	0,235	Valid
4	A4		0,604	0,235	Valid
5	A5		0,467	0,235	Valid
6	B1	X1	0,588	0,235	Valid
7	B2		0,597	0,235	Valid
8	B3		0,509	0,235	Valid
9	B4		0,431	0,235	Valid
10	B5		0,581	0,235	Valid
11	C1	X2	0,379	0,235	Valid
12	C2		0,386	0,235	Valid
13	C3		0,657	0,235	Valid
14	C4		0,401	0,235	Valid
15	C5		0,672	0,235	Valid
16	D1	X3	0,527	0,235	Valid
17	D2		0,422	0,235	Valid
18	D3		0,359	0,235	Valid
19	D4		0,521	0,235	Valid
20	D5		0,443	0,235	Valid

Sumber : Data primer (diolah 2026)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, seluruh butir pernyataan dari 20 item yang mengukur variabel transparansi (X1), akuntabilitas (X2), partisipatif anggaran (X3), dan efektivitas (Y) menunjukkan nilai Corrected Item-Total Correlation (r hitung) yang bergerak antara 0,359 hingga 0,672. Hal ini menunjukkan jika dibandingkan dengan nilai r tabel untuk sampel 70 responden ($n = 70$) pada taraf signifikan 5% yaitu sebesar 0,235, maka seluruh nilai r hitung dari 20 item pernyataan tersebut memiliki nilai lebih besar dari r tabel (r hitung $> 0,235$).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan layak digunakan untuk pengumpulan data selanjutnya.

4.3.2 Uji Reabilitas Instrumen

Setelah dilakukan uji validitas dan seluruh butir pertanyaan dinyatakan valid, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi dan stabilitas instrumen penelitian apabila dilakukan pengukuran secara berulang kali. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel atau instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan dapat diandalkan apabila memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,60. Adapun rangkuman hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel disajikan pada Tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Reabilitas

Nama Variabel	Jumlah Pertanyaan	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Transparansi	5	0,770	Reliabel
Akuntabilitas	5	0,730	Reliabel
Partisipatif Anggaran	5	0,698	Reliabel

Sumber : Data primer (diolah 2026)

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* yang berada di atas batas minimal standar sebesar 0,60. Nilai *Cronbach's Alpha* tertinggi diperoleh oleh variabel Transparansi sebesar 0,770,

diikuti oleh variabel Akuntabilitas sebesar 0,730, dan variabel Partisipatif anggaran sebesar 0,698. Karena seluruh nilai *Cronbach's Alpha* dari setiap variabel lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliabel (andal) dan memiliki tingkat konsistensi yang baik untuk digunakan dalam pengumpulan data selanjutnya.

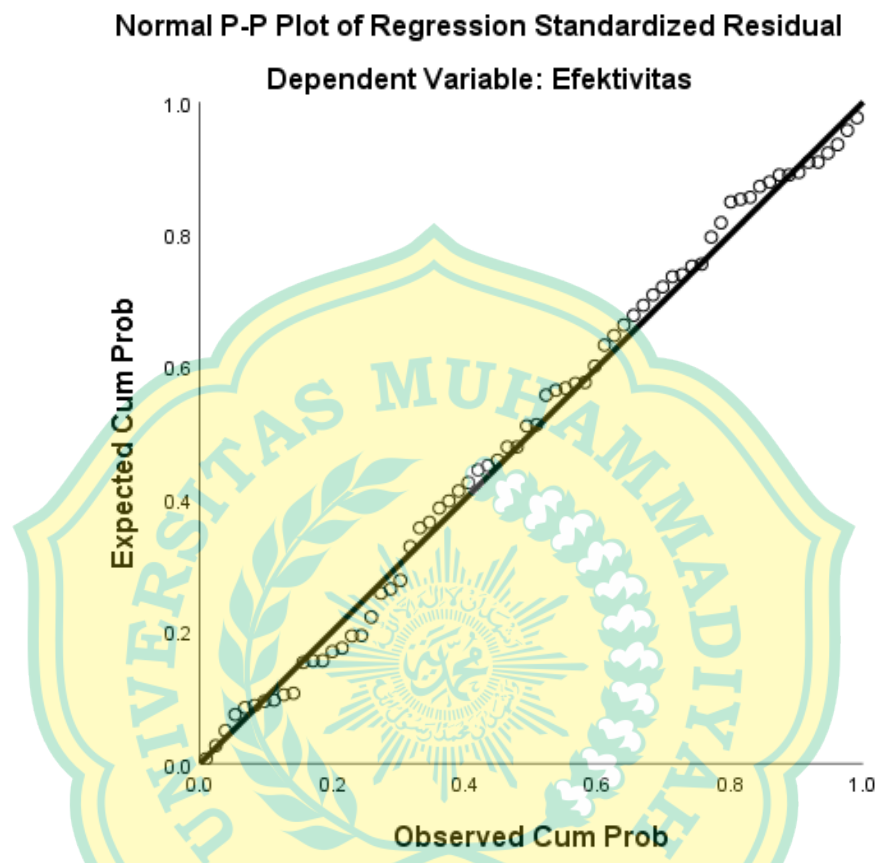
4.3.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat-syarat ekonometrika, sehingga estimasi parameter model bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

4.3.3.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik, yaitu melihat tampilan *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Prinsip dari metode visual ini adalah mendeteksi normalitas data melalui penyebaran titik-titik residual yang dibandingkan dengan garis lurus diagonal. Model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas apabila persebaran data (titik-titik plot) merapat dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Adapun hasil uji normalitas

untuk model regresi dengan variabel dependen Efektivitas disajikan pada Gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1
Normal Probability Plot Hasil Pengujian Normalitas Data

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, hasil tampilan grafik *Normal P-P Plot* menunjukkan bahwa titik-titik data residual menyebar secara merata di sekitar garis lurus diagonal dan pengembangannya secara konsisten mengikuti arah garis diagonal tersebut. Pola sebaran data visual yang merapat pada garis lurus ini mengindikasikan bahwa nilai residual dari model regresi telah memenuhi asumsi normalitas secara visual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

nilai residual pada model regresi ini terdistribusi secara normal, sehingga model dinyatakan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahapan analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis berikutnya.

4.3.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) melalui program SPSS. Kriteria keputusan pengujian menetapkan bahwa model regresi dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 ($> 0,10$) dan nilai VIF lebih kecil dari 10,00 ($< 10,00$). Hasil pengujian multikolinearitas pada masing-masing variabel independen disajikan pada Tabel 4.9 berikut :

Tabel 4.9
Nilai Variance Inflation Factor (VIF) Masing-Masing Variabel

No	Variabel	Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
1	Transparansi	0,582	1,719	Non Multikolinearitas
2	Akuntabilitas	0,742	1,348	Non Multikolinearitas
3	Partisipatif Anggaran	0,576	1,737	Non Multikolinearitas

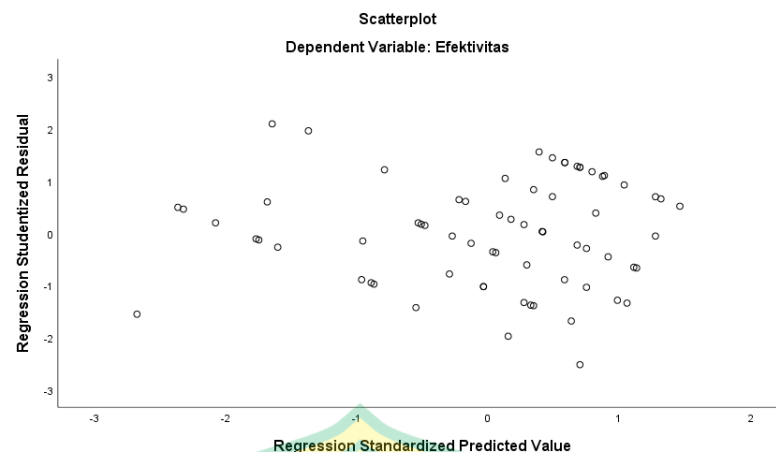
Sumber : Data primer (diolah 2026)

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Transparansi memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,582 dan VIF 1,719; variabel Akuntabilitas memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,742 dan VIF 1,348; serta

variabel Partisipatif Anggaran memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,576 dan VIF 1,737. Melalui hasil tersebut, dapat dicermati bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF yang jauh lebih kecil dari 10,00. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas, sehingga data tersebut memenuhi syarat asumsi klasik untuk digunakan dalam pengujian hipotesis selanjutnya.

4.3.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik dan memenuhi syarat asumsi klasik adalah model yang bersifat homoskedastisitas (varians residual konstan atau tidak terjadi heteroskedastisitas). Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis grafik dengan melihat pola penyebaran titik-titik pada *Scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen (*Regression Standardized Predicted Value*) dengan residualnya (*Regression Studentized Residual*). Adapun tampilan grafik *Scatterplot* untuk model regresi dengan variabel dependen Efektivitas disajikan pada Gambar 4.2 berikut:



Gambar 4.2

Grafik Scatterplot Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 4.2, hasil tampilan grafik *Scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik data penyebaran residual menyebar secara acak, tidak menumpuk di satu tempat, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Selain itu, sebaran titik-titik data tersebut tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur atau bergelombang (seperti melebar kemudian menyempit). Karakteristik persebaran yang acak dan tanpa pola visual ini mengindikasikan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi homoskedastisitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk tahapan analisis regresi linear berganda selanjutnya.

4.4 Analisis Deskriptif

4.1 Variabel Transparansi

Variabel Transparansi dalam penelitian ini diukur menggunakan 5 (lima) butir pernyataan yang disebarikan kepada 68 orang responden. Analisis deskriptif ini

Berdasarkan Tabel 4.10, variabel Transparansi secara keseluruhan memperoleh nilai rata-rata 4,5 yang masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik dengan sangat optimal. Indikator dengan skor tertinggi terletak pada pernyataan nomor 1 mengenai keterbukaan informasi penggunaan dana desa (4,59), di mana mayoritas responden (60,3%) menyatakan Sangat Setuju. Sementara itu, pemahaman masyarakat terhadap pengambilan keputusan (pernyataan 4) dan ketepatan waktu penerimaan laporan realisasi (pernyataan 5) juga bernilai sangat tinggi dengan skor masing-masing 4,53 dan 4,51. Di sisi lain, kemudahan akses publikasi laporan keuangan pada pernyataan nomor 2 memperoleh rata-rata terendah sebesar 4,40 karena adanya 1 orang responden (1,5%) yang menyatakan Tidak Setuju. Meskipun demikian, angka ini tetap berada pada kategori sangat baik dan hanya mengindikasikan perlunya sedikit perluasan media publikasi agar informasi keuangan desa dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan.

4.2 Variabel Akuntabilitas

Analisis deskriptif variabel Akuntabilitas dilakukan terhadap 5 (lima) butir pernyataan menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi 68 responden mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Nilai rata-rata skor (*mean*) dan distribusi persentase frekuensi digunakan untuk mengidentifikasi tingkat akuntabilitas pemerintah desa. Seluruh data hasil pengolahan deskriptif untuk variabel ini disajikan secara ringci pada Tabel 4.11 berikut :

Tabel 4.11
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas

No	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Rata-rata
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Saya menilai pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa.	0	0	1	1,5	0	0	25	36,8	42	61,8	4,59
2	Saya melihat penggunaan dana desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	0	0	2	2,9	6	8,8	29	42,6	31	45,6	4,31
3	Saya merasa monitoring dan evaluasi anggaran desa berjalan efektif.	0	0	1	1,5	8	11,8	26	38,2	33	48,5	4,34
4	Saya menerima laporan penggunaan dana desa secara transparan.	0	0	1	1,5	11	16,2	24	35,3	32	47,1	4,28
5	Saya melihat pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan rencana.	0	0	1	1,5	5	7,4	27	39,7	35	51,5	4,41
Rerata												4,386

Berdasarkan Tabel 4.11, variabel Akuntabilitas secara keseluruhan memperoleh nilai rata-rata 4,386 yang termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Hasil ini menandakan bahwa pemerintah desa dinilai sangat bertanggung jawab dan patuh terhadap regulasi yang berlaku dalam mengelola dana desa. Skor tertinggi dicapai oleh pernyataan nomor 1 mengenai penilaian masyarakat terhadap tanggung jawab pemerintah desa (4,59), dengan mayoritas responden

(61,8%) menyatakan Sangat Setuju. Kesesuaian pengelolaan dana desa dengan rencana (pernyataan 5) serta efektivitas monitoring dan evaluasi anggaran (pernyataan 3) juga mendapat respons yang sangat positif dengan skor masing-masing 4,41 dan 4,34. Di sisi lain, keselarasan penggunaan dana desa dengan peraturan (pernyataan 2) memperoleh skor 4,31, sedangkan penerimaan laporan penggunaan dana desa secara transparan (pernyataan 4) memperoleh skor 4,28. Adanya sebagian responden yang memilih Kurang Setuju pada pernyataan nomor 4 (16,2%) dan nomor 5 (7,4%) menjadi catatan minor bahwa pemerintah desa perlu mengoptimalkan keterbukaan laporan dan konsistensi realisasi di lapangan agar selaras secara sempurna dengan perencanaan awal yang telah disepakati bersama masyarakat.

4.3 Variabel Partisipatif Anggaran

Analisis deskriptif variabel Partisipasi Anggaran dilakukan terhadap 5 (lima) butir pernyataan menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi 68 responden mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran desa. Nilai rata-rata skor (*mean*) dan distribusi persentase frekuensi digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat partisipasi yang telah terbangun. Seluruh data hasil pengolahan deskriptif untuk variabel ini disajikan secara rinci pada Tabel 4.12 berikut :

Tabel 4.12
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Partisipatif Anggaran

No	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Rata-rata
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Saya diajak berkonsultasi sebelum anggaran desa ditetapkan.	0	0	1	1,5	10	14,7	34	50,0	23	33,8	4,16
2	Saya mendapatkan informasi perencanaan anggaran desa secara transparan.	0	0	2	2,9	5	7,4	28	41,2	33	48,5	4,35
3	Saya melihat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif dalam penyusunan anggaran desa.	0	0	1	1,5	4	5,9	30	44,1	33	48,5	4,40
4	Saya merasa aspirasi masyarakat dipertimbangkan dalam anggaran desa.	0	0	2	2,9	6	8,8	29	42,6	31	45,6	4,31
5	Saya dilibatkan secara aktif dalam musyawarah anggaran desa.	0	0	1	1,5	4	5,9	34	50,0	29	42,6	4,34
Rerata												4,312

Berdasarkan Tabel 4.12, variabel Partisipatif Anggaran secara keseluruhan memperoleh nilai rata-rata 4,312 yang termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Hasil ini mengindikasikan bahwa pelibatan dan keaktifan masyarakat dalam proses penganggaran desa sudah berjalan dengan sangat baik. Skor tertinggi dicapai oleh pernyataan nomor 3 mengenai peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan anggaran (4,40), dengan mayoritas responden (48,5%) menyatakan Sangat Setuju. Hal ini disusul oleh respons positif pada

pernyataan nomor 2 mengenai keterbukaan informasi perencanaan (4,35), pernyataan nomor 5 terkait keterlibatan aktif dalam musyawarah (4,34), serta pernyataan nomor 4 mengenai aspirasi masyarakat yang dipertimbangkan (4,31).

Di sisi lain, nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan nomor 1 mengenai ajakan konsultasi sebelum anggaran ditetapkan, yakni sebesar 4,16. Pada indikator ini, terdapat 10 orang responden (14,7%) yang memilih Kurang Setuju. Meskipun secara umum skor ini tetap berada dalam kategori tinggi/baik, temuan tersebut menjadi catatan bahwa pemerintah desa perlu memperluas jangkauan undangan atau forum konsultasi pra-anggaran agar seluruh elemen masyarakat merasa dilibatkan sejak tahap awal perencanaan secara merata.

4.4 Variabel Efektivitas

Analisis deskriptif variabel Efektivitas dilakukan terhadap 5 (lima) butir pernyataan menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi 68 responden mengenai tingkat keberhasilan dan efisiensi pengelolaan dana desa. Nilai rata-rata skor (*mean*) dan distribusi persentase frekuensi digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana program dana desa mencapai target yang diharapkan. Seluruh data hasil pengolahan deskriptif untuk variabel ini disajikan secara rinci pada Tabel 4.13 berikut :

Tabel 4.13
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Efektivitas

No	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Rata-rata
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Saya melihat program dana desa berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.	0	0	0	0	0	0	35	51,5	33	48,5	4,49
2	Saya menilai anggaran dana desa telah digunakan secara efisien.	0	0	0	0	0	0	33	48,5	35	51,5	4,51
3	Saya melihat pelaksanaan program dana desa berjalan tepat waktu.	0	0	0	0	1	1,5	36	52,9	31	45,6	4,44
4	Saya merasa puas dengan hasil program dana desa.	0	0	0	0	1	1,5	35	51,5	32	47,1	4,46
5	Saya merasa pengelolaan dana desa bebas dari penyelewengan.	0	0	0	0	1	1,5	30	44,1	37	54,4	4,53
Rerata												4,486

Berdasarkan Tabel 4.13, variabel Efektivitas secara keseluruhan memperoleh nilai rata-rata 4,486 yang termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Hasil ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan dan hasil program dana desa dinilai sangat berhasil oleh masyarakat. Skor tertinggi dicapai oleh pernyataan nomor 5 mengenai pandangan masyarakat bahwa pengelolaan dana desa bebas dari penyelewengan (4,53), dengan mayoritas responden (54,4%) menyatakan Sangat Setuju. Respon positif ini juga didukung oleh pernyataan nomor 2 terkait efisiensi penggunaan anggaran (4,51) dan pernyataan nomor 1 mengenai tercapainya target program yang ditetapkan (4,49). Di sisi lain, nilai rata-rata terendah berada pada pernyataan nomor 3 terkait ketepatan waktu pelaksanaan

program (4,44) dan pernyataan nomor 4 terkait kepuasan hasil program (4,46). Pada kedua indikator tersebut, masing-masing terdapat 1 orang responden (1,5%) yang memilih Kurang Setuju. Meskipun tetap dalam kategori sangat baik, temuan minor ini menunjukkan perlunya peningkatan kontrol berkala terhadap lini masa proyek fisik dan kualitas hasil akhir program guna meminimalkan ketidakpuasan warga.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel independen yang terdiri dari Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Partisipatif Anggaran (X3) terhadap variabel dependen, yaitu Efektivitas (Y). Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS, nilai koefisien regresi dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.368	.414		3.307	.002
	Transparansi	.307	.113	.319	2.715	.009
	Akuntabilitas	.186	.078	.249	2.391	.020
	Partisipatif Anggaran	.213	.091	.276	2.335	.023

a. Dependent Variable: Efektivitas

Sumber : Data Output SPSS

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas, maka persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = 1,368 + 0,307X_1 + 0,186X_2 + 0,213X_3$$

Persamaan regresi linier berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta (α) = 1,368

Nilai konstanta (α) yang bermuatan positif sebesar 1,368 memberikan makna statistik bahwa apabila variabel Transparansi (X_1), Akuntabilitas (X_2), dan Partisipatif Anggaran (X_3) diasumsikan konstan atau dalam kondisi tidak mengalami perubahan (bernilai nol), maka tingkat Efektivitas (Y) pengelolaan dana desa tetap akan terbentuk sebesar 1,368 satuan.

2. Koefisien regresi variabel transparansi (β_1) = 0,307

Nilai koefisien regresi untuk variabel Transparansi (β_1) memiliki arah positif sebesar 0,307. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel Transparansi sebesar satu satuan, maka variabel Efektivitas diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 0,307 satuan dengan catatan variabel Akuntabilitas dan Partisipatif Anggaran diasumsikan berada dalam kondisi tetap atau konstan.

3. Koefisien regresi variabel akuntansi (β_2) = 0,186

Nilai koefisien regresi untuk variabel Akuntabilitas (β_2) menunjukkan arah positif sebesar 0,186. Angka ini memberikan arti bahwa apabila variabel Akuntabilitas ditingkatkan sebesar satu satuan, maka nilai variabel

Efektivitas akan terdorong naik sebesar 0,186 satuan, dengan asumsi bahwa kondisi variabel Transparansi dan Partisipatif Anggaran tidak berubah (konstan).

4. Koefisien regresi variabel partisipatif anggaran (β_3) = 0,213

Nilai koefisien regresi variabel Partisipatif Anggaran (β_3) juga bernilai positif sebesar 0,213. Hal ini bermakna bahwa setiap ada penambahan atau peningkatan pada variabel Partisipatif Anggaran sebesar satu satuan, maka tingkat Efektivitas pengelolaan dana desa akan ikut meningkat sebesar 0,213 satuan, dengan asumsi nilai variabel Transparansi dan Akuntabilitas dalam keadaan konstan.

4.5.1 Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2)

Pengujian selanjutnya dilakukan untuk mengukur tingkat hubungan serta besarnya kontribusi dari variabel Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif Anggaran secara bersama-sama terhadap Efektivitas. Adapun hasil analisis koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi (R^2) disajikan dalam tabel *Model Summary* di bawah ini:

Tabel 4.15
Tabel Model Summary

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.696 ^a	.485	.461	.27250
a. Predictors: (Constant), Partisipatif Anggaran, Akuntabilitas, Transparansi				
b. Dependent Variable: Efektivitas				

Sumber : Data Output SPSS (diolah 2026)

1. Koefisien Korelasi (R)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel *Model Summary*, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,696. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan searah antara variabel Partisipatif Anggaran, Akuntabilitas, dan Transparansi secara simultan (bersama-sama) dengan variabel Efektivitas. Hubungan yang searah ini mengindikasikan bahwa semakin optimal penerapan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggaran, maka efektivitas pengelolaan yang dihasilkan juga akan cenderung semakin meningkat.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil analisis SPSS, nilai koefisien determinasi (*R Square*) yang diperoleh adalah sebesar 0,485. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebesar 48,5% variasi atau perubahan pada variabel efektivitas dapat dijelaskan oleh kontribusi variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran secara bersama-sama. Sementara itu, sisanya sebesar 51,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini yang tidak ikut diukur. Selain itu, nilai *Adjusted R Square* yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel di dalam model menunjukkan angka 0,461 yang berarti kemampuan variasi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen setelah dikoreksi adalah sebesar 46,1%.

4.5.2 Pembuktian Hipotesis

1. Pembuktian Secara Parsial (Uji t)

Uji t (parsial) dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen—yaitu Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Partisipatif Anggaran (X3) memiliki pengaruh yang signifikan secara individual terhadap variabel dependen, yaitu Efektivitas (Y). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (Sig.) dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan ($\alpha = 0,05$) serta membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Jika nilai sig < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai sig > 0,05 dan nilai t hitung < t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil dari pengujian parsial (uji t) disajikan pada Tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.16
Hasil uji t (Parsial)

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.368	.414		3.307	.002
	Transparansi	.307	.113	.319	2.715	.009
	Akuntabilitas	.186	.078	.249	2.391	.020
	Partisipatif Anggaran	.213	.091	.276	2.335	.023

a. Dependent Variable: Efektivitas

Sumber : Output SPSS (diolah, 2026)

1.1. Pengaruh Transparansi (X1) terhadap Efektivitas (Y)

Dari uji statistik diperoleh nilai t hitung sebesar 2,715 dan nilai signifikansi sebesar 0,009. Apabila dibandingkan dengan nilai t tabel

sebesar 1,998, maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,715 > 1,998$) dan nilai signifikansinya jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,009 < 0,05$). Berdasarkan kriteria ini, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas. Secara teoritis dan praktis, temuan ini menjelaskan bahwa semakin tinggi keterbukaan informasi publik, kemudahan akses dokumen, serta keterbukaan dalam proses pengelolaan yang dijalankan, maka akan secara nyata meningkatkan efektivitas kinerja dan pencapaian tujuan pengelolaannya.

1.2. Pengaruh Akuntabilitas (X2) terhadap Efektivitas (Y)

Hasil perhitungan Uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,391 dengan nilai signifikansi sebesar 0,020. Dengan membandingkan terhadap kriteria statistik yang ada, nilai t hitung terbukti lebih besar daripada nilai t tabel ($2,391 > 1,998$) serta nilai signifikansi berada di bawah batas 0,05 ($0,020 < 0,05$). Hasil pengujian ini memberikan keputusan untuk menolak H_0 dan menerima H_a , sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas. Hal ini mengimplikasikan bahwa keberadaan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur, dan berorientasi pada aturan akan secara langsung memberikan dorongan positif terhadap terwujudnya efektivitas pengelolaan.

1.3. Pengaruh Partisipatif Anggaran (X3) terhadap Efektivitas (Y)

Berdasarkan output pengujian, nilai t hitung yang diperoleh adalah sebesar 2,335 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,023. Karena nilai t hitung lebih besar dibandingkan nilai t tabel ($2,335 > 1,998$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,023 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kesimpulan dari hasil ini adalah partisipatif anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas. Temuan ini mempertegas bahwa keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran merupakan faktor penting yang secara signifikan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

2. Uji Simultan (Uji f)

Pengujian hipotesis secara simultan dilakukan dengan menggunakan Uji f yang bertujuan untuk menguji apakah seluruh variabel independen, yaitu transparansi (X_1), akuntabilitas (X_2), dan partisipatif anggaran (X_3), secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu efektivitas (Y). Kriteria pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai f hitung dengan f tabel serta memperhatikan nilai tingkat signifikansi (Sig) pada taraf $\alpha = 0,05$ (5%). Berdasarkan aturan pengambilan keputusan statistik, jika nilai f hitung $> f$ tabel (2,751) dan nilai sig $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang menandakan bahwa variabel Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif Anggaran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas. Sebaliknya,

apabila $f_{hitung} \leq 2,751$ dan $sig \geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Adapun hasil pengujian ANOVA untuk Uji F disajikan secara rinci pada Tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.17
Analysis Of Variance (ANOVA)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.473	3	1.491	20.079	.000 ^b
	Residual	4.752	64	.074		
	Total	9.225	67			
a. Dependent Variable: Efektivitas						
b. Predictors: (Constant), Partisipatif Anggaran, Akuntabilitas, Transparansi						
Sumber : Output SPSS (diolah, 2026)						

Sumber : Output SPSS (diolah, 2026)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 4.17 di atas, diperoleh nilai f_{hitung} sebesar 20,079 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (0,000^b). Hasil pengujian statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai f_{tabel} sebesar 2,751 (pada tingkat signifikansi 5%, $df_1 = 3$, dan $df_2 = 64$). Dari perbandingan tersebut, terlihat jelas bahwa nilai f_{hitung} jauh lebih besar daripada nilai f_{tabel} ($20,079 > 2,751$) dan tingkat signifikansinya jauh di bawah batas toleransi yang ditetapkan ($0,000 < 0,05$).

Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yang telah ditetapkan, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini membuktikan secara empiris bahwa Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Partisipatif Anggaran (X3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas (Y). Temuan ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sudah layak untuk menjelaskan variabel

Efektivitas. Secara substansial, hasil ini menegaskan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan dipengaruhi secara terpadu oleh penerapan transparansi yang terbuka, akuntabilitas yang tinggi, serta partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan anggaran secara serentak.

4.6 Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran berpengaruh secara signifikan dan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya. Secara empiris, hasil ini berimplikasi bahwa efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya dipengaruhi secara nyata oleh penerapan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Keterbukaan publikasi APBDes, kepatuhan laporan pertanggungjawaban (LPJ), serta pelibatan masyarakat dalam Musrenbangdes menjadi penentu utama untuk mengubah tata kelola yang bersifat *compliance-driven* (sekadar mengejar kepatuhan administratif di angka efektivitas rata-rata 85%) menjadi *performance-driven* yang berdampak langsung pada pembangunan desa.

Selain itu, akuntabilitas yang diterapkan secara konsisten juga memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan karena aparat desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa secara administratif maupun moral kepada pemerintah yang lebih tinggi dan kepada masyarakat.

Selanjutnya, partisipatif anggaran juga terbukti memiliki kontribusi yang penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran memungkinkan kebutuhan riil masyarakat dapat diidentifikasi dengan lebih tepat, sehingga program yang dijalankan menjadi lebih sesuai dengan prioritas pembangunan desa. Partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan kolektif yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana dan meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan dana desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa semata, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Keadaan ini pada akhirnya mendorong terciptanya efektivitas penggunaan dana desa yang lebih baik, baik dari segi pencapaian target program, ketepatan waktu pelaksanaan, efisiensi penggunaan anggaran, maupun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian terdahulu oleh Pratama & Kamela (2025), Kurniawan & Putriani (2022), serta Aswir & Misbah (2021) yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta

berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa pengelolaan dana desa akan berjalan lebih baik apabila prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, dan partisipasi diterapkan secara bersama-sama dalam proses tata kelola keuangan desa. Kesamaan hasil tersebut memperkuat dugaan bahwa prinsip-prinsip good governance memang memiliki hubungan yang erat dengan keberhasilan pengelolaan dana publik di tingkat desa. Dengan kata lain, efektivitas pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang diterima, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut.

Implikasi dari hasil penelitian ini juga menunjukkan pemerintah desa di Kecamatan Banda Raya perlu terus meningkatkan kualitas transparansi melalui penyediaan informasi anggaran yang jelas, mudah diakses, dan dipahami oleh masyarakat. Bentuk transparansi tersebut dapat diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan, penyampaian informasi realisasi anggaran secara berkala, serta pemanfaatan media informasi desa yang efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya Periode 2024, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Transparansi terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya. Keterbukaan informasi publik, kemudahan akses masyarakat terhadap data anggaran, serta penyampaian realisasi keuangan secara jujur dan berkala mampu menekan risiko penyimpangan dan meningkatkan efektivitas capaian program desa.
2. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya. Tingginya kepatuhan aparatur desa terhadap regulasi, sistem pelaporan LPJ/SPJ yang tertib berbasis hasil (outcome), serta pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi secara berkala secara nyata mampu mendorong pencapaian target kerja desa yang efisien dan tepat sasaran.
3. Partisipatif anggaran berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya. Pelibatan masyarakat dan lembaga desa (seperti Tuha Peut Gampong/TPG) secara aktif dalam tahapan Musrenbangdes, penyerapan

aspirasi, hingga pengawasan lapangan memastikan program pembangunan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat lokal.

4. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya. Ketiga pilar *Good Village Governance* ini saling menguatkan; integrasi antara keterbukaan data, pertanggungjawaban hukum/administratif, dan kontrol sosial warga merupakan kunci utama dalam mengoptimalkan serapan dan kemanfaatan Dana Desa.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Gampong (Aparatur Desa)

Aparatur desa diimbau untuk bertransformasi dari pola pikir yang hanya berfokus pada kepatuhan formal administratif (*compliance-driven*) menjadi lebih berani mengoptimalkan eksekusi anggaran pada program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang inovatif (*performance-driven*). Upaya ini perlu didukung oleh modernisasi media transparansi, yaitu dengan mengubah penyampaian informasi yang tadinya sebatas baliho konvensional menjadi publikasi digital yang komunikatif melalui situs web desa maupun media sosial menggunakan bahasa yang mudah dipahami warga awam. Selain itu, belajar dari fenomena ketidaksesuaian anggaran atau penyerapan yang melampaui plafon (*over-budgeting*) pada lokasi tertentu, perangkat desa harus memperkuat kualitas perencanaan dan estimasi penganggaran agar lebih akurat dan terukur di masa mendatang.

2. Bagi Tuha Peut Gampong (TPG) dan Masyarakat

Tuha Peut Gampong (TPG) diharapkan dapat meningkatkan peran pengawasannya dari yang semula berfokus pada persetujuan administratif menjadi pengawasan substantif yang mengawal keberhasilan fisik serta pencapaian manfaat (*outcome*) program secara langsung di lapangan. Di sisi lain, masyarakat—khususnya kelompok perempuan, pemuda, dan marginal—diharapkan dapat terus meningkatkan partisipasi aktifnya dalam forum Musrenbangdes agar aspirasi pembangunan yang diserap benar-benar merepresentasikan kebutuhan riil.

3. Bagi Pemerintah Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Banda Aceh

Pemerintah Kecamatan bersama DPMG perlu menyelenggarakan bimbingan teknis (*Bimtek*) dan pendampingan secara berkala untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, terutama terkait penguasaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), penyusunan LPJ berbasis kinerja, dan teknik peramalan anggaran. Selain itu, instansi pembina juga perlu menyusun standardisasi evaluasi kinerja desa yang tidak hanya mengukur rasio serapan dana secara kuantitatif, tetapi juga menilai dampak dan keberlanjutan dari setiap program pembangunan serta pemberdayaan yang dijalankan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel independen lain yang relevan namun belum terakomodasi dalam model ini, seperti kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi (*e-government*), maupun penerapan sistem

pengendalian intern (SPI). Di samping itu, penggunaan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan analisis kuantitatif dengan wawancara mendalam kualitatif sangat dianjurkan agar dinamika sosial politik dan konteks lokal dalam pengelolaan Dana Desa dapat terungkap secara lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Aldi Febriansyah, Elan Eriswanto, & Tina Kartini. (2024). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Akuntansi* 45, 5(2), 418–426. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3364>
- Aswir, & Misbah, H. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1–13.
- Ayu Yusnida, E., & Anindya Pangestika, M. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Se- Kecamatan Bumijawa. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 8(1), 25–41. <https://doi.org/10.30599/utility.v8i1.3231>
- Badrian. (2021). Pengaruh Efektivitas Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. Alianz Life Insurance Indonesia Kantor Cabang Pondok Indah. *Jurnal Pengembangan Bisnis & Manajemen*, XXI(39).
- Editya Rangga Pratama, & Hurian Kamela. (2025). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Kuantitatif Pada Kecamatan Sekupang. *Jurnal Indonesia Manajemen, Akuntansi, Ekonomi*, 1(4), 157–162. <https://doi.org/10.61674/baqzyy24>
- Fadilla, A., & Sinurat, G. (2023). Analisis Tata Kelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dan Pengaruhnya Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bogor. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 76–84. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.15218>
- Faizatul Wardah, & Miftahol Horri. (2025). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Dana Desa Pada Desa Gunungteguh, Sangkapura, Bawean. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(4), 41–53. <https://doi.org/10.69714/49wh8w97>
- Kurniawan, A., & 2 Dewi Putriani, 3Ulul Azmi Mustofa. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipatif Anggaran Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Masa. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 3(2), 86–99.
- Nurul Arifin, Afrah Junita, & Nasrul Kahfi. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(1), 49–63. <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i1.2585>
- Pribadi, W. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan

Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam (SEBI)*, 6(1), 63–72.
[http://etheses.uingusdur.ac.id/7386/%0Ahttp://etheses.uingusdur.ac.id/7386/1/4118017_COVER_BAB I %26 BAB V.pdf](http://etheses.uingusdur.ac.id/7386/%0Ahttp://etheses.uingusdur.ac.id/7386/1/4118017_COVER_BAB%20I%26%20BAB%20V.pdf)

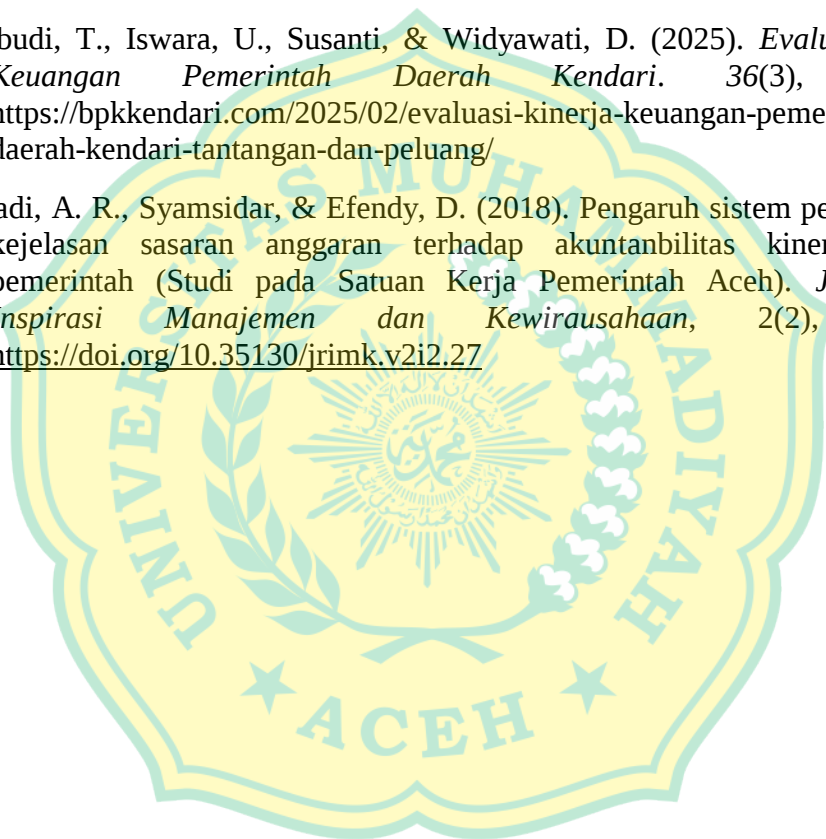
Putriani, D. (2021). Cover Bab 1 5 Dapus. *Putriani, Dewi*.

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). 2, 306–312.

Rijal, M. S., Handayani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). Accountability, Transparency, Community Participation and Management. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(November), 3301–3313.

Setyabudi, T., Iswara, U., Susanti, & Widyawati, D. (2025). *Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kendari*. 36(3), 255–262.
<https://bpkkendari.com/2025/02/evaluasi-kinerja-keuangan-pemerintah-daerah-kendari-tantangan-dan-peluang/>

Mulyadi, A. R., Syamsidar, & Efendy, D. (2018). Pengaruh sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh). *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(2), 95–101.
<https://doi.org/10.35130/jrimk.v2i2.27>



LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Dokumentasi APBG&LPJ

 REALISASI APBG TA 2024 GAMPONG LAMPEUOT KEUCHIK GP. LAMPEUOT : RIANTO  			
PENDAPATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	LEBIH/(KURANG) (RP)
PENDAPATAN ASLI GAMPONG	9.840.000,00	10.190.671,00	350.671,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.511.948.380,00	1.343.999.869,00	167.948.511,00
DANA DESA	679.981.000,00	679.981.000,00	0,00
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI	129.806.056,00	0,00	129.806.056,00
ALOKASI DANA GAMPONG	702.161.324,00	664.018.869,00	38.142.455,00
PENDAPATAN LAIN-LAIN	109.522.455,00	107.295.861,03	2.226.593,97
JUMLAH PENDAPATAN	1.631.310.835,00	1.461.486.401,03	169.824.433,97
BELANJA	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	LEBIH/(KURANG) (RP)
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH GAMPONG	669.597.184,00	642.073.940,00	27.523.244,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG	364.036.738,00	356.928.525,00	7.108.213,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	138.233.500,00	125.433.500,00	12.800.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	164.715.000,00	164.715.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULAN BENCANA / DARURAT	278.722.245,00	169.200.000,00	109.522.245,00
JUMLAH BELANJA	1.615.304.667,00	1.458.350.965,00	156.953.702,00
SURPLUS / (DEVISIT)	16.006.168,00	3.135.436,03	12.870.731,97
PEMBIAYAAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	LEBIH/(KURANG) (RP)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.637.842,00	69.637.842,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	85.644.010,00	59.495.000,00	26.149.010,00
JUMLAH PEMBIAYAAN	16.006.168,00	10.142.842,00	26.149.010,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	13.278.278,03	13.278.278,03

 gamponglampeuet@gmail.com

 gamponglampeuet2024

 LAPORAN REALISASI APBG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA GAMPONG PEMERINTAH GAMPONG LAMLAGANG TAHUN ANGGARAN 2024 REUSAM NEUA TAHUN 2024 			
PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
PENDAPATAN ASLI GAMPONG	Rp 23.000.000	Rp 23.000.000	Rp 23.000.000
PENDAPATAN TRANSFER	Rp 23.000.000	Rp 23.000.000	Rp 23.000.000
Dana Desa	Rp 1.796.555.070	Rp 1.542.046.345	Rp 254.508.725
Bagian Hasil Dari Pajak	Rp 819.396.890	Rp 819.396.890	Rp 0
Alokasi Dana Gampong	Rp 146.208.320	Rp 146.208.320	Rp 0
Dana Distribusi Daerah	Rp 775.153.881	Rp 723.743.248	Rp 50.410.633
PENDAPATAN LAINNYA	Rp 51.886.850	Rp 51.886.850	Rp 0
Bagi Hasil Pajak	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	Rp 0
Bagi Hasil Pajak	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	Rp 0
BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Rp 1.819.596.896	Rp 797.371.776	Rp 1.022.225.120
Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Gampong	Rp 494.829.500	Rp 490.000.500	Rp 4.829.000
Bidang Penyelenggaraan Pembinaan Gampong	Rp 115.446.620	Rp 76.159.770	Rp 39.286.850
Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Gampong	Rp 173.127.000	Rp 160.632.000	Rp 12.495.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Monev	Rp 151.000.000	Rp 126.000.000	Rp 25.000.000
PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
Penerimaan Pembiayaan	Rp 131.135.856	Rp 131.135.856	Rp 0
Silpa Tahun Sebelumnya	Rp 131.135.856	Rp 131.135.856	Rp 0
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 131.135.856	Rp 131.135.856	Rp 0
Penyerahan Modal Gampong (BUMG)	Rp 131.135.856	Rp 131.135.856	Rp 0

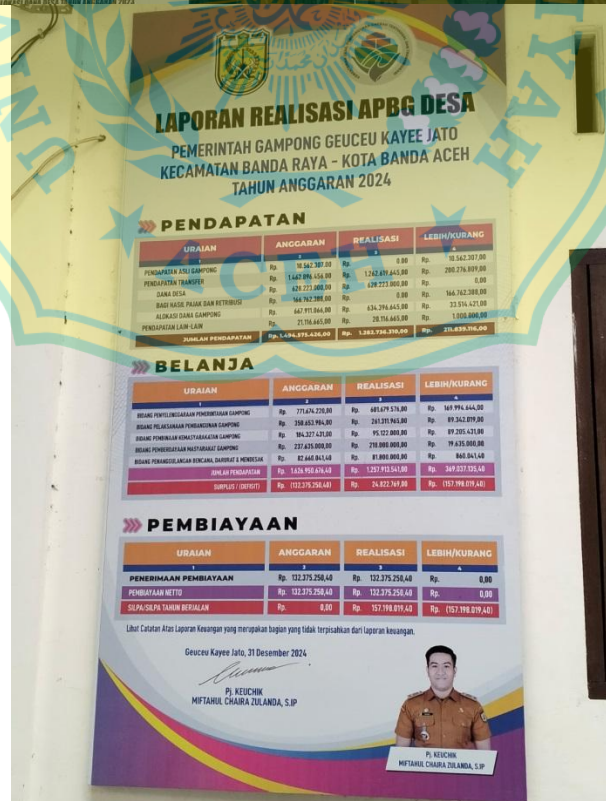





 @GAMPONGLAMLAGANG
  WWW.GAMPONGLAMLAGANG.ID
  INFO@GAMPONGLAMLAGANG.ID

JL. BAHAGIA NO.01 GAMPONG LAMLAGANG KEC.BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH







REALISASI APBD TA 2024
GAMPONG GEUCEU KOMPLEK
 KECAMATAN BANDA RAYA - KOTA BANDA ACEH
 Keuchik Gp. Geuceu Komplek : Syahrul SE

PENDAPATAN			
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH (KURANG) (Rp)
PENDAPATAN ASLI GAMPONG	34.500.000,00	37.863.984,00	3.363.984,00
PENDAPATAN TRANSFER	2.830.374.954,00	1.812.558.306,00	216.816.648,00
DANA DESA	1.118.934.000,00	1.118.934.000,00	0,00
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI	163.047.458,00	0,00	163.047.458,00
ALOKASI DANA GAMPONG	748.393.496,00	694.624.306,00	53.769.190,00
PENDAPATAN LAIN-LAIN	1.000.000,00	1.770.971,34	770.971,34
JUMLAH PENDAPATAN	2.065.874.954,00	1.893.193.241,34	212.681.712,66

BELANJA			
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH (KURANG) (Rp)
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH GAMPONG	829.802.125,00	569.364.301,00	259.937.824,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG	675.284.376,00	648.491.850,00	26.792.526,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	181.868.803,00	126.828.000,00	54.840.803,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	269.120.000,00	229.550.000,00	39.570.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA / DARURAT	201.817.040,00	178.465.000,00	23.352.040,00
JUMLAH BELANJA	2.167.892.344,00	1.752.169.151,00	404.523.193,00
SURPLUS / (DEVISIT)	(91.617.390,00)	100.024.990,34	(191.841.481,03)

PEMBIAYAAN			
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH (KURANG) (Rp)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	91.817.390,00	91.817.390,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	91.817.390,00	91.817.390,00	0,00
SILPA / SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	191.841.481,03	(191.841.481,03)

CONTACT PERSON : 0813 6001 1108 (KEUCHIK) 0813 5007 7933 (SEKDES)
 GAMPONG GEUCEU KOMPLEK - KECAMATAN BANDA RAYA
 KOTA BANDA ACEH

lekgeuceu@gmail.com <http://geuceukomplek-gp.bandaacehkat.go.id> @geuceukomplek.id

Lampiran 2 Kuisioner Penelitian

Judul Penelitian :

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif Anggaran Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Banda Raya Periode 2024

Kata Pengantar :

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i Responden,

Saya Difa Mahirah Faisal Mahasiswi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif Anggaran Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banda Raya Periode 2024".

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berpartisipasi mengisi kuisioner penelitian dibawah ini sesuai dengan pengalaman yang pernah bapak/ibu/saudara/i alami.

Penelitian ini dilakukan untuk kepentingan akademik. Identitas dan semua informasi yang Anda berikan akan dijamin kerahasiaannya. Atas waktu, kesediaan, dan kerjasama yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan, saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Difa Mahirah Faisal

Petunjuk Pengisian :

Kuisisioner ini menyediakan 5 (lima) alternative jawaban untuk setiap pertanyaan yaitu :

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Kurang Setuju (KS)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

A. Identitas Responden :

1. Nama : _____
2. Jenis Kelamin :
 - ☐ Laki-laki
 - ☐ Perempuan
3. Usia :
 - ☐ 20-30
 - ☐ 31-40
 - ☐ 41-50
 - ☐ >50
4. Pendidikan Terakhir :
 - ☐ SMA/Sederajat
 - ☐ D-III
 - ☐ S1
 - ☐ S2

- S3

5. Nama Desa :

- Geuceu Kayee Jato
- Geuceu Iniem
- Geuceu Komplek
- Lamlagang
- Lam Ara
- Lampeut
- Lhong Cut
- Lhong Raya
- Mibo
- Peunyeurat

6. Jabatan/Posisi Saat Ini :

- Sekretaris Desa
- KAUR Keuangan
- KAUR Umum
- KASI Pemerintahan
- KASI Pembangunan&Kesra
- KASI Pelayanan
- Staff

B. Pernyataan Kuisisioner :

Variabel Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya melihat program dana desa berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.					
2	Saya menilai anggaran dana desa telah digunakan secara efisien.					
3	Saya melihat pelaksanaan program dana desa berjalan tepat waktu.					
4	Saya merasa puas dengan hasil program dana desa.					
5	Saya merasa pengelolaan dana desa bebas dari penyelewengan.					

Variabel Transparansi (X1)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya mendapatkan informasi penggunaan dana desa secara terbuka.					
2	Saya mudah mengakses publikasi laporan keuangan desa.					
3	Saya tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan data anggaran desa.					
4	Saya memahami proses pengambilan keputusan penggunaan dana desa.					
5	Saya menerima laporan realisasi anggaran desa secara rutin dan tepat waktu.					

Variabel Akuntabilitas (X2)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya menilai pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa.					
2	Saya melihat penggunaan dana desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
3	Saya merasa monitoring dan evaluasi anggaran desa berjalan efektif.					
4	Saya menerima laporan penggunaan dana desa secara transparan.					
5	Saya melihat pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan rencana.					

Variabel Partisipatif Anggaran (X3)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya diajak berkonsultasi sebelum anggaran desa ditetapkan.					
2	Saya mendapatkan informasi perencanaan anggaran desa secara transparan.					
3	Saya melihat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif dalam penyusunan anggaran desa.					
4	Saya merasa aspirasi masyarakat dipertimbangkan dalam anggaran desa.					
5	Saya dilibatkan secara aktif dalam musyawarah anggaran desa.					

Lampiran 3 Laporan Pendapatan & Realisasi Anggaran Desa

1. Desa Geuceu Iniem

No	Pendapatan Desa	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	Pendapatan Asli Gampong	Rp 15.000.000	-	Rp 15.000.000
2	Dana Desa	Rp 728.605.000	Rp 728.605.000	-
3	Dana Bagi Hasil Pajak & Retribusi	Rp 199.887.698	-	Rp 199.887.698
4	Alokasi Dana Gampong	Rp 744.671.759	Rp 697.617.608	Rp 47.054.151
5	Pendapatan Lain-lain	Rp 2.550.000	Rp 1.807.592	Rp 742.407
Total		Rp 1.690.714.457	Rp 1.428.030.200	Rp 262.684.256

2. Desa Geuceu Kayee Jato

No	Pendapatan Desa	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	Pendapatan Asli Gampong	Rp 10.562.307	-	Rp 10.562.307
2	Pendapatan Transfer	Rp 1.462.896.456	Rp 1.262.619.645	Rp 200.276.809
3	Dana Desa	Rp 628.223.000	Rp 628.223.000	-
4	Dana Bagi Hasil Pajak & Retribusi	Rp 166.762.388	-	Rp 166.762.388
5	Alokasi Dana Gampong	Rp 667.911.066	Rp 634.396.645	Rp 33.514.421
6	Pendapatan Lain-lain	Rp 21.116.665	Rp 20.116.665	Rp 1.000.000
Total		Rp 1.494.575.426	Rp 1.282.736.310	Rp 211.839.116

3. Desa Geuceu Komplek

No	Pendapatan Desa	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	Pendapatan Asli Gampong	Rp 34.500.000	Rp 37.863.964	Rp 3.363.964
2	Pendapatan Transfer	Rp 2.030.374.954	Rp 1.813.558.306	Rp 216.816.648
3	Dana Desa	Rp 1.118.934.000	Rp 1.118.934.000	-
4	Dana Bagi Hasil Pajak & Retribusi	Rp 163.047.458	-	Rp 163.047.458
5	Alokasi Dana Gampong	Rp 748.393.496	Rp 694.624.306	Rp 53.769.190
6	Pendapatan Lain-lain	Rp 1.000.000	Rp 1.770.971	Rp 770.971
Total		Rp 2.065.874.954	Rp 1.853.193.241	Rp 212.681.712

4. Desa Lam Ara

No	Pendapatan Desa	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	Pendapatan Asli Gampong	Rp 30.392.068	-	-
2	Pendapatan Transfer	Rp 1.822.011.228	-	-
3	Pendapatan Lain-lain	Rp 20.870.112	-	-
Total		Rp 1.873.273.408	Rp 1.964.547.935	Rp 91.274.527

5. Desa Lampeut

No	Pendapatan Desa	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	Pendapatan Asli Gampong	Rp 9.840.000	Rp 10.190.671	Rp 350.671
2	Pendapatan Transfer	Rp 1.511.948.380	Rp 1.343.999.869	Rp 167.948.511
3	Dana Desa	Rp 679.981.000	Rp 679.981.000	-
4	Dana Bagi Hasil Pajak & Retribusi	Rp 129.806.056	-	Rp 129.806.056
5	Alokasi Dana Gampong	Rp 702.161.324	Rp 664.018.869	Rp 38.142.455
6	Pendapatan Lain-lain	Rp 109.522.455	Rp 107.295.861	Rp 2.226.593
Total		Rp 1.631.310.835	Rp 1.461.486.401	Rp 169.824.433

6. Desa Lamlagang

No	Pendapatan Desa	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	Pendapatan Asli Gampong	Rp 25.000.000	-	Rp 25.000.000
2	Hasil Aset Gampong	Rp 25.000.000	-	Rp 25.000.000
3	Pendapatan Transfer	Rp 1.796.555.070	Rp 1.542.048.345	Rp 254.506.725
4	Dana Desa	Rp 819.306.000	Rp 819.306.000	-
5	Bagian Hasil Dari Pajak	Rp 146.208.339	-	Rp 146.208.339
6	Alokasi Dana Gampong	Rp 779.153.881	Rp 722.742.345	Rp 56.411.536
7	Dana Distribusi Daerah	Rp 51.886.850	-	Rp 51.886.850
8	Pendapatan Lain-lain	Rp 1.100.000	-	Rp 1.100.000

7. Desa Lhong Cut

No	Pendapatan Desa	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	Pendapatan Asli Gampong	Rp 50.000.000	Rp 408.277	Rp 49.591.723
2	Pendapatan Transfer	Rp 1.660.149.337	Rp 1.469.598.172	Rp 190.551.165
3	Pendapatan Lain-lain	Rp 250.000	Rp 879.771	Rp 629.771
Total		Rp 1.710.399.337	Rp 1.470.886.220	Rp 239.513.116

8. Desa Lhong Raya

No	Pendapatan Desa	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	Pendapatan Asli Gampong	Rp 102.113.249	Rp 32.999.101	Rp 69.114.148
2	Hasil Aset Gampong	Rp 101.500.000	Rp 31.000.000	Rp 70.500.000
3	Hasil Sewa Rumah Gampong	Rp 44.500.000	Rp 31.000.000	Rp 13.500.000
4	Hasil Sewa Toko Gampong	Rp 57.000.000	-	Rp 57.000.000
3	Pendapatan Transfer	Rp 1.705.269.973	Rp 1.498.756.207	Rp 206.513.766
4	Dana Desa	Rp 802.185.000	Rp 802.185.000	-
5	Bagi Hasil Pajak	Rp 161.986.614	-	Rp 161.986.614
6	Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota	Rp 161.986.614	-	Rp 161.986.614
7	Alokasi Dana Gampong	Rp 741.098.359	Rp 696.571.207	Rp 44.527.152
Total		Rp 1.846.342.818	Rp 1.564.845.943	Rp 281.496.874

9. Desa Mibo

No	Pendapatan Desa	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	Pendapatan Asli Gampong	Rp 80.150.000	Rp 78.887.863	Rp 1.262.137
2	Pendapatan Transfer	Rp 1.660.474.149	Rp 1.450.803.472	Rp 209.670.677
3	Pendapatan Lain-lain	Rp 7.744.000	Rp 7.248.916	Rp 495.083
Total		Rp 1.748.368.149	Rp 1.536.940.251	Rp 211.427.897

10. Desa Peunyeurat

No	Pendapatan Desa	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	Pendapatan Asli Gampong	Rp 35.755.762	Rp 26.724.979	Rp 9.030.783
2	Pendapatan Transfer	Rp 1.516.631.060	Rp 1.297.673.002	Rp 218.958.058
3	Pendapatan Lain-lain	Rp 18.239.248	Rp 17.389.972	Rp 849.276
Total		Rp 1.570.626.070	Rp 1.341.787.953	Rp 228.838.117

Lampiran 4 Karakteristik Responden

No	Karakteristik Responden				
	KR1	KR2	KR3	KR4	KR5
1	1	4	1	4	1
2	1	3	3	4	6
3	1	2	1	4	7
4	1	2	3	4	2
5	2	2	2	8	2
6	1	2	3	8	1
7	1	2	3	8	3
8	1	2	3	8	6
9	1	2	3	8	5
10	1	2	3	8	4
11	1	4	1	4	4
12	2	1	3	6	3
13	1	2	3	6	1
14	1	1	3	6	2
15	2	2	1	6	7
16	1	3	1	4	5
17	1	1	3	7	1
18	1	4	2	4	3
19	1	2	3	7	3
20	1	1	3	7	5
21	2	3	3	7	4
22	2	2	2	6	4
23	1	3	2	10	1
24	2	2	3	10	4
25	1	3	3	10	5
26	1	4	3	10	6
27	2	2	3	10	3
28	2	2	4	10	2
29	2	3	3	7	2
30	1	3	2	7	6
31	1	2	3	3	1
32	1	4	1	3	2
33	1	2	1	3	3
34	1	4	1	3	4

No	Karakteristik Responden				
	KR1	KR2	KR3	KR4	KR5
35	2	3	2	3	5
36	2	3	3	3	6
37	1	3	3	2	1
38	2	3	3	2	2
39	2	3	1	2	3
40	1	3	3	2	4
41	2	3	5	2	5
42	2	3	1	2	6
43	1	3	3	2	7
44	1	4	2	1	1
45	2	3	3	1	2
46	1	3	2	1	3
47	1	3	1	1	4
48	1	3	3	1	5
49	2	3	3	1	6
50	2	3	1	1	7
51	1	3	3	5	1
52	1	2	3	5	2
53	2	3	1	5	4
54	1	3	1	5	5
55	1	3	2	5	6
56	1	3	2	5	3
57	2	3	2	5	7
58	1	4	1	9	1
59	1	4	1	9	5
60	1	3	2	9	6
61	2	2	3	9	3
62	2	3	4	9	4
63	2	2	3	9	2
64	2	3	1	9	7
65	2	3	3	6	5
66	2	3	3	6	6
67	1	2	3	7	7
68	1	2	2	8	7

Hasil Kuisisioner

No	Efektivitas					Y
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
1	5	5	4	4	5	4,60
2	5	5	5	5	5	5,00
3	4	4	4	4	4	4,00
4	5	5	5	5	5	5,00
5	4	4	4	4	4	4,00
6	4	4	4	4	4	4,00
7	4	4	4	4	4	4,00
8	4	4	4	4	4	4,00
9	4	4	4	4	4	4,00
10	5	4	4	4	5	4,40
11	4	5	4	4	4	4,20
12	4	4	4	4	4	4,00
13	4	4	4	4	4	4,00
14	4	4	3	3	3	3,40
15	5	5	5	5	5	5,00
16	5	4	4	4	5	4,40
17	5	5	5	5	5	5,00
18	4	4	4	4	4	4,00
19	4	5	4	4	5	4,40
20	4	5	4	5	5	4,60
21	4	5	4	5	4	4,40
22	5	5	5	5	5	5,00
23	4	5	4	4	4	4,20
24	4	5	5	5	5	4,80
25	4	4	4	4	4	4,00
26	4	5	5	5	4	4,60
27	5	5	4	4	5	4,60
28	5	5	5	5	5	5,00
29	5	5	5	5	4	4,80
30	4	4	5	5	5	4,60
31	4	5	5	5	4	4,60
32	5	4	4	4	5	4,40
33	5	5	4	4	5	4,60
34	4	5	5	5	4	4,60

No	Efektivitas					Y
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
35	5	4	5	5	4	4,60
36	4	5	5	5	4	4,60
37	5	5	5	5	4	4,80
38	5	5	5	5	5	5,00
39	5	5	5	5	5	5,00
40	5	5	5	5	5	5,00
41	5	4	5	4	5	4,60
42	5	5	5	5	5	5,00
43	5	5	5	5	5	5,00
44	5	4	5	4	4	4,40
45	4	4	4	4	5	4,20
46	4	5	4	4	4	4,20
47	4	4	4	5	5	4,40
48	4	4	4	4	4	4,00
49	4	4	4	4	4	4,00
50	4	5	4	4	4	4,20
51	5	4	4	4	4	4,20
52	4	4	5	4	4	4,20
53	5	4	5	5	5	4,80
54	5	5	5	5	5	5,00
55	5	4	4	4	5	4,40
56	4	4	5	4	5	4,40
57	5	4	4	5	4	4,40
58	4	4	4	4	5	4,20
59	5	4	4	5	5	4,60
60	4	4	4	5	5	4,40
61	5	5	5	4	4	4,60
62	4	5	4	4	5	4,40
63	4	4	4	5	4	4,20
64	5	4	5	4	5	4,60
65	4	5	5	5	5	4,80
66	5	5	4	4	5	4,60
67	5	5	5	5	5	5,00
68	5	5	5	5	5	5,00

No	Transparansi					X1
	X11	X12	X13	X14	X15	
1	5	5	5	5	5	5,00
2	5	5	5	4	4	4,60
3	5	5	5	5	4	4,80
4	5	5	5	5	5	5,00
5	4	4	4	4	4	4,00
6	4	4	4	4	4	4,00
7	4	4	4	4	4	4,00
8	4	4	4	4	4	4,00
9	4	4	4	4	4	4,00
10	5	4	4	4	4	4,20
11	5	4	4	4	4	4,20
12	5	5	5	4	5	4,80
13	4	4	4	4	4	4,00
14	4	4	3	4	3	3,60
15	5	5	5	5	5	5,00
16	4	4	4	4	4	4,00
17	5	4	5	5	5	4,80
18	4	4	4	4	4	4,00
19	5	4	4	5	4	4,40
20	5	4	4	4	4	4,20
21	5	4	4	4	4	4,20
22	5	5	5	5	5	5,00
23	5	4	4	5	4	4,40
24	5	5	4	4	5	4,60
25	5	5	5	5	5	5,00
26	5	5	5	5	5	5,00
27	5	5	4	5	5	4,80
28	5	5	5	5	5	5,00
29	4	5	5	4	4	4,40
30	5	5	5	5	5	5,00
31	3	2	4	4	4	3,40
32	4	4	4	5	4	4,20
33	4	4	4	5	5	4,40
34	4	4	4	4	4	4,00

No	Transparansi					X1
	X11	X12	X13	X14	X15	
35	4	4	4	5	5	4,40
36	4	4	4	5	4	4,20
37	5	5	5	5	5	5,00
38	5	5	5	5	5	5,00
39	5	5	4	5	5	4,80
40	5	5	5	5	5	5,00
41	5	4	5	5	5	4,80
42	5	4	5	5	5	4,80
43	5	5	5	5	5	5,00
44	4	5	4	4	5	4,40
45	4	4	5	5	4	4,40
46	4	4	5	4	4	4,20
47	4	4	5	4	4	4,20
48	4	4	4	5	4	4,20
49	4	4	5	4	4	4,20
50	4	4	4	4	4	4,00
51	4	4	4	5	5	4,40
52	5	4	5	4	5	4,60
53	4	4	5	5	5	4,60
54	5	4	5	5	5	4,80
55	5	4	4	5	5	4,60
56	5	5	4	5	5	4,80
57	4	4	4	5	5	4,40
58	5	4	5	4	5	4,60
59	5	5	5	4	5	4,80
60	5	5	5	5	4	4,80
61	5	4	4	4	5	4,40
62	5	5	5	4	4	4,60
63	5	5	4	4	5	4,60
64	5	4	4	4	5	4,40
65	5	5	4	5	4	4,60
66	5	5	5	5	5	5,00
67	5	5	5	4	4	4,60
68	4	5	5	5	5	4,80

No	Akuntabilitas					X2
	X21	X22	X23	X24	X25	
1	5	5	5	5	5	5,00
2	5	5	5	4	5	4,80
3	5	5	4	4	4	4,40
4	5	5	5	4	5	4,80
5	4	3	4	3	4	3,60
6	4	4	2	4	2	3,20
7	2	4	3	2	3	2,80
8	4	3	4	4	4	3,80
9	4	4	3	4	3	3,60
10	5	4	5	4	5	4,60
11	5	5	4	5	4	4,60
12	5	4	4	3	4	4,00
13	4	4	4	3	4	3,80
14	4	2	3	4	3	3,20
15	5	4	4	5	4	4,40
16	5	4	5	4	5	4,60
17	5	3	5	3	5	4,20
18	4	4	4	4	4	4,00
19	5	5	5	4	5	4,80
20	5	5	5	5	5	5,00
21	5	5	4	5	4	4,60
22	5	5	5	5	5	5,00
23	5	5	4	4	4	4,40
24	4	5	5	5	5	4,80
25	4	4	4	5	4	4,20
26	4	4	3	4	4	3,80
27	4	4	5	5	5	4,60
28	5	3	5	3	5	4,20
29	5	4	4	5	4	4,40
30	5	4	5	5	5	4,80
31	5	5	4	3	4	4,20
32	5	4	5	5	5	4,80
33	4	4	5	5	5	4,60
34	5	5	4	3	4	4,20

No	Akuntabilitas					X2
	X21	X22	X23	X24	X25	
35	4	5	5	5	5	4,80
36	4	4	5	5	5	4,60
37	5	5	5	5	5	5,00
38	5	5	4	4	5	4,60
39	5	5	5	5	5	5,00
40	5	4	3	5	3	4,00
41	4	4	3	4	4	3,80
42	5	5	5	5	5	5,00
43	5	3	5	3	5	4,20
44	4	5	4	4	4	4,20
45	5	4	5	4	5	4,60
46	4	5	5	4	5	4,60
47	5	4	4	5	4	4,40
48	4	4	3	4	4	3,80
49	5	4	4	3	4	4,00
50	4	2	3	3	3	3,00
51	5	5	4	4	4	4,40
52	4	5	5	5	5	4,80
53	5	5	4	4	5	4,60
54	5	5	4	5	4	4,60
55	5	3	5	3	5	4,20
56	5	4	5	5	5	4,80
57	5	5	4	4	4	4,40
58	5	5	4	5	4	4,60
59	4	4	5	5	5	4,60
60	5	4	5	4	5	4,60
61	5	4	5	5	5	4,80
62	5	4	5	5	5	4,80
63	5	5	5	5	5	5,00
64	4	5	5	4	5	4,60
65	4	5	5	5	5	4,80
66	4	5	4	5	4	4,40
67	4	4	4	5	4	4,20
68	5	5	4	5	4	4,60

No	Partisipatif Anggaran					X3
	X31	X32	X33	X34	X35	
1	4	5	5	4	4	4,40
2	4	4	5	5	4	4,40
3	3	4	3	4	2	3,20
4	5	5	5	5	5	5,00
5	4	4	3	4	3	3,60
6	2	3	4	3	4	3,20
7	4	3	4	3	4	3,60
8	3	4	3	4	4	3,60
9	3	4	2	4	3	3,20
10	4	4	4	5	5	4,40
11	4	2	3	4	4	3,40
12	3	5	5	5	4	4,40
13	4	3	4	2	4	3,40
14	3	3	5	3	3	3,40
15	5	5	4	5	3	4,40
16	4	4	4	5	4	4,20
17	5	5	5	5	5	5,00
18	4	4	5	4	4	4,20
19	5	5	5	5	4	4,80
20	3	5	4	4	4	4,00
21	4	5	4	5	5	4,60
22	4	5	5	4	5	4,60
23	4	5	4	5	4	4,40
24	4	4	5	5	4	4,40
25	5	5	4	5	4	4,60
26	4	5	5	5	4	4,60
27	4	5	4	5	5	4,60
28	5	4	5	4	5	4,60
29	5	4	5	5	4	4,60
30	5	5	4	4	5	4,60
31	5	5	4	4	4	4,40
32	3	4	5	3	4	3,80
33	3	4	4	4	5	4,00
34	4	2	4	2	4	3,20

No	Partisipatif Anggaran					X3
	X31	X32	X33	X34	X35	
35	4	4	5	4	4	4,20
36	3	4	4	3	4	3,60
37	4	5	5	5	4	4,60
38	5	5	5	5	5	5,00
39	5	4	4	4	5	4,40
40	5	5	5	5	5	5,00
41	4	5	4	5	5	4,60
42	5	4	5	4	5	4,60
43	4	5	4	5	5	4,60
44	4	5	4	3	4	4,00
45	4	5	4	5	5	4,60
46	4	4	5	4	4	4,20
47	4	4	5	4	5	4,40
48	4	5	4	4	4	4,20
49	3	4	4	5	4	4,00
50	4	4	5	4	4	4,20
51	4	4	5	5	4	4,40
52	4	5	4	4	4	4,20
53	4	5	4	4	5	4,40
54	4	4	5	4	5	4,40
55	4	5	4	4	5	4,40
56	5	4	5	5	5	4,80
57	5	5	5	5	4	4,80
58	4	4	5	4	5	4,40
59	5	5	4	5	5	4,80
60	4	5	5	4	5	4,60
61	5	5	4	5	4	4,60
62	5	5	5	5	5	5,00
63	4	5	4	5	4	4,40
64	5	4	5	4	5	4,60
65	5	4	5	5	5	4,80
66	5	3	5	4	5	4,40
67	5	4	5	5	5	4,80
68	5	5	4	4	4	4,40

Lampiran 5 Frekuensi Karakteristik Responden

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	42	61.8	61.8	61.8
	Perempuan	26	38.2	38.2	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-30	4	5.9	5.9	5.9
	31-40	22	32.4	32.4	38.2
	41-50	33	48.5	48.5	86.8
	>50	9	13.2	13.2	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA/Sederajat	17	25.0	25.0	25.0
	D-III	13	19.1	19.1	44.1
	S1	35	51.5	51.5	95.6
	S2	2	2.9	2.9	98.5
	S3	1	1.5	1.5	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Asal Desa					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Geuceu Kayee Jato	7	10.3	10.3	10.3
	Geuceu Iniem	7	10.3	10.3	20.6
	Geuceu Komplek	6	8.8	8.8	29.4
	Lamlagang	7	10.3	10.3	39.7
	Lam Ara	7	10.3	10.3	50.0
	Lampeuot	7	10.3	10.3	60.3
	Lhong Cut	7	10.3	10.3	70.6
	Lhong Raya	7	10.3	10.3	80.9
	Mibo	7	10.3	10.3	91.2
	Peunyeurat	6	8.8	8.8	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Jabatan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sekretaris Desa	10	14.7	14.7	14.7
	KAUR Keuangan	10	14.7	14.7	29.4
	KAUR Umum	10	14.7	14.7	44.1
	KASI Pemerintahan	10	14.7	14.7	58.8
	KASI Pembangunan&Kesra	10	14.7	14.7	73.5
	KASI Pelayanan	10	14.7	14.7	88.2
	Staff	8	11.8	11.8	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Lampiran 6 Frekuensi Transparansi (X1)

Saya mendapatkan informasi penggunaan dana desa secara terbuka					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	1	1.5	1.5	1.5
	Setuju	26	38.2	38.2	39.7
	Sangat Setuju	41	60.3	60.3	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Saya mudah mengakses publikasi laporan keuangan desa					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.5	1.5	1.5
	Setuju	38	55.9	55.9	57.4
	Sangat Setuju	29	42.6	42.6	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Saya tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan data anggaran desa					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	1	1.5	1.5	1.5
	Setuju	34	50.0	50.0	51.5
	Sangat Setuju	33	48.5	48.5	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Saya memahami proses pengambilan keputusan penggunaan dana desa					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	32	47.1	47.1	47.1
	Sangat Setuju	36	52.9	52.9	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Saya menerima laporan realisasi anggaran desa secara rutin dan tepat waktu					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	1	1.5	1.5	1.5
	Setuju	31	45.6	45.6	47.1
	Sangat Setuju	36	52.9	52.9	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Saya mendapatkan informasi penggunaan dana desa secara terbuka	68	3	5	4.59	.525
Saya mudah mengakses publikasi laporan keuangan desa	68	2	5	4.40	.577
Saya tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan data anggaran desa	68	3	5	4.47	.532
Saya memahami proses pengambilan keputusan penggunaan dana desa	68	4	5	4.53	.503
Saya menerima laporan realisasi anggaran desa secara rutin dan tepat waktu	68	3	5	4.51	.532
Valid N (listwise)	68				

Lampiran 7 Frekuensi Akuntabilitas (X2)

Saya menilai pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.5	1.5	1.5
	Setuju	25	36.8	36.8	38.2
	Sangat Setuju	42	61.8	61.8	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Saya melihat penggunaan dana desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	2.9	2.9	2.9
	Kurang Setuju	6	8.8	8.8	11.8
	Setuju	29	42.6	42.6	54.4
	Sangat Setuju	31	45.6	45.6	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Saya merasa monitoring dan evaluasi anggaran desa berjalan efektif					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.5	1.5	1.5
	Kurang Setuju	8	11.8	11.8	13.2
	Setuju	26	38.2	38.2	51.5
	Sangat Setuju	33	48.5	48.5	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Saya menerima laporan penggunaan dana desa secara transparan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.5	1.5	1.5
	Kurang Setuju	11	16.2	16.2	17.6
	Setuju	24	35.3	35.3	52.9
	Sangat Setuju	32	47.1	47.1	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Saya melihat pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan rencana					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.5	1.5	1.5
	Kurang Setuju	5	7.4	7.4	8.8
	Setuju	27	39.7	39.7	48.5
	Sangat Setuju	35	51.5	51.5	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Saya menilai pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa	68	2	5	4.59	.579
Saya melihat penggunaan dana desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku	68	2	5	4.31	.758
Saya merasa monitoring dan evaluasi anggaran desa berjalan efektif	68	2	5	4.34	.745
Saya menerima laporan penggunaan dana desa secara transparan	68	2	5	4.28	.789
Saya melihat pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan rencana	68	2	5	4.41	.696
Valid N (listwise)	68				

Lampiran 8 Frekuensi Partisipatif Anggaran (X3)

Saya diajak berkonsultasi sebelum anggaran desa ditetapkan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.5	1.5	1.5
	Kurang Setuju	10	14.7	14.7	16.2
	Setuju	34	50.0	50.0	66.2
	Sangat Setuju	23	33.8	33.8	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Saya mendapatkan informasi perencanaan anggaran desa secara transparan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	2.9	2.9	2.9
	Kurang Setuju	5	7.4	7.4	10.3
	Setuju	28	41.2	41.2	51.5
	Sangat Setuju	33	48.5	48.5	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Saya melihat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif dalam penyusunan anggaran desa					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.5	1.5	1.5
	Kurang Setuju	4	5.9	5.9	7.4
	Setuju	30	44.1	44.1	51.5
	Sangat Setuju	33	48.5	48.5	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Saya merasa aspirasi masyarakat dipertimbangkan dalam anggaran desa					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	2.9	2.9	2.9
	Kurang Setuju	6	8.8	8.8	11.8
	Setuju	29	42.6	42.6	54.4
	Sangat Setuju	31	45.6	45.6	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Saya dilibatkan secara aktif dalam musyawarah anggaran desa					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.5	1.5	1.5
	Kurang Setuju	4	5.9	5.9	7.4
	Setuju	34	50.0	50.0	57.4
	Sangat Setuju	29	42.6	42.6	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Saya diajak berkonsultasi sebelum anggaran desa ditetapkan	68	2	5	4.16	.725
Saya mendapatkan informasi perencanaan anggaran desa secara transparan	68	2	5	4.35	.748
Saya melihat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif dalam penyusunan anggaran desa	68	2	5	4.40	.672
Saya merasa aspirasi masyarakat dipertimbangkan dalam anggaran desa	68	2	5	4.31	.758
Saya dilibatkan secara aktif dalam musyawarah anggaran desa	68	2	5	4.34	.660
Valid N (listwise)	68				

Lampiran 9 Frekuensi Efektivitas (Y)

Saya melihat program dana desa berhasil mencapai target yang telah ditetapkan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	35	51.5	51.5	51.5
	Sangat Setuju	33	48.5	48.5	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Saya menilai anggaran dana desa telah digunakan secara efisien					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	33	48.5	48.5	48.5
	Sangat Setuju	35	51.5	51.5	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Saya melihat pelaksanaan program dana desa berjalan tepat waktu					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	1	1.5	1.5	1.5
	Setuju	36	52.9	52.9	54.4
	Sangat Setuju	31	45.6	45.6	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Saya merasa puas dengan hasil program dana desa					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	1	1.5	1.5	1.5
	Setuju	35	51.5	51.5	52.9
	Sangat Setuju	32	47.1	47.1	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Saya merasa pengelolaan dana desa bebas dari penyelewengan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	1	1.5	1.5	1.5
	Setuju	30	44.1	44.1	45.6
	Sangat Setuju	37	54.4	54.4	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Saya melihat program dana desa berhasil mencapai target yang telah ditetapkan	68	4	5	4.49	.503
Saya menilai anggaran dana desa telah digunakan secara efisien	68	4	5	4.51	.503
Saya melihat pelaksanaan program dana desa berjalan tepat waktu	68	3	5	4.44	.529
Saya merasa puas dengan hasil program dana desa	68	3	5	4.46	.531
Saya merasa pengelolaan dana desa bebas dari penyelewengan	68	3	5	4.53	.532
Valid N (listwise)	68				

Lampiran 10 Reabilitas dan Validitas Efektivitas (Y)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.759	.758	5

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Saya melihat program dana desa berhasil mencapai target yang telah ditetapkan	17.94	2.444	.473	.309	.734
Saya menilai anggaran dana desa telah digunakan secara efisien	17.91	2.470	.454	.238	.741
Saya melihat pelaksanaan program dana desa berjalan tepat waktu	17.99	2.164	.641	.502	.673
Saya merasa puas dengan hasil program dana desa	17.97	2.208	.604	.483	.687
Saya merasa pengelolaan dana desa bebas dari penyelewengan	17.90	2.392	.467	.280	.738

Lampiran 11 Reabilitas dan Validitas Transparansi (X1)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.770	.769	5

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Saya mendapatkan informasi penggunaan dana desa secara terbuka	17.91	2.470	.588	.416	.712
Saya mudah mengakses publikasi laporan keuangan desa	18.10	2.333	.597	.426	.708
Saya tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan data anggaran desa	18.03	2.566	.509	.271	.739
Saya memahami proses pengambilan keputusan penggunaan dana desa	17.97	2.745	.431	.241	.763
Saya menerima laporan realisasi anggaran desa secara rutin dan tepat waktu	17.99	2.462	.581	.367	.714

Lampiran 12 Reabilitas dan Validitas Akuntabilitas (X2)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.730	.733	5

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Saya menilai pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa	17.34	4.884	.379	.154	.723
Saya melihat penggunaan dana desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku	17.62	4.389	.386	.205	.726
Saya merasa monitoring dan evaluasi anggaran desa berjalan efektif	17.59	3.738	.657	.879	.614
Saya menerima laporan penggunaan dana desa secara transparan	17.65	4.262	.401	.207	.723
Saya melihat pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan rencana	17.51	3.865	.672	.878	.613

Lampiran 13 Reabilitas dan Validitas Partisipatif Anggaran (X3)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.698	.697	5

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Saya diajak berkonsultasi sebelum anggaran desa ditetapkan	17.40	3.765	.527	.298	.617
Saya mendapatkan informasi perencanaan anggaran desa secara transparan	17.21	3.957	.422	.331	.663
Saya melihat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif dalam penyusunan anggaran desa	17.16	4.317	.359	.207	.686
Saya merasa aspirasi masyarakat dipertimbangkan dalam anggaran desa	17.25	3.683	.521	.387	.619
Saya dilibatkan secara aktif dalam musyawarah anggaran desa	17.22	4.145	.443	.253	.654

Lampiran 14 Regresi

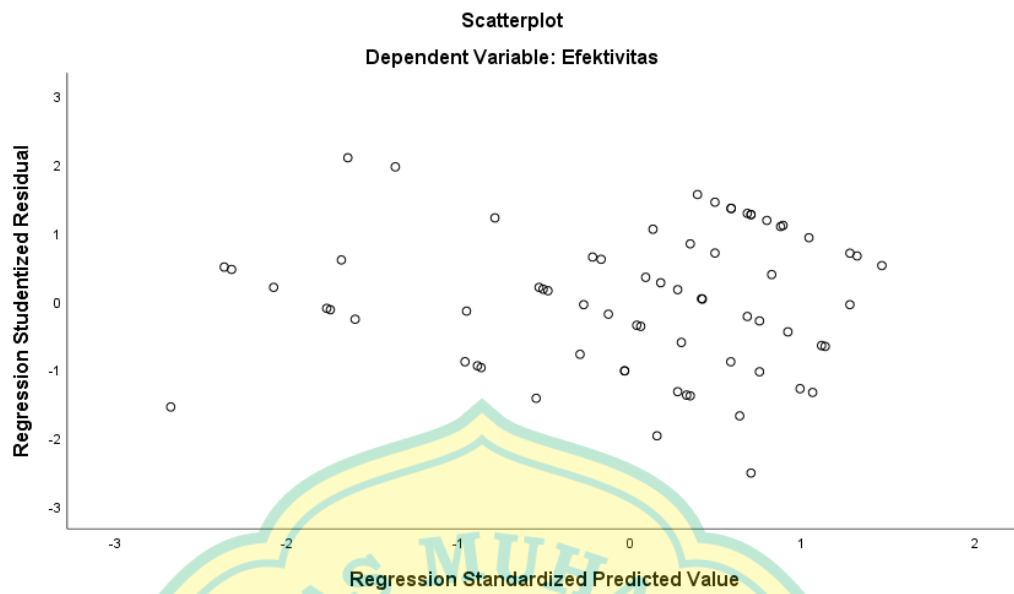
Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Partisipatif Anggaran, Akuntabilitas, Transparansi ^b	.	Enter
a. Dependent Variable: Efektivitas			
b. All requested variables entered.			

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.696 ^a	.485	.461	.27250
a. Predictors: (Constant), Partisipatif Anggaran, Akuntabilitas, Transparansi				
b. Dependent Variable: Efektivitas				

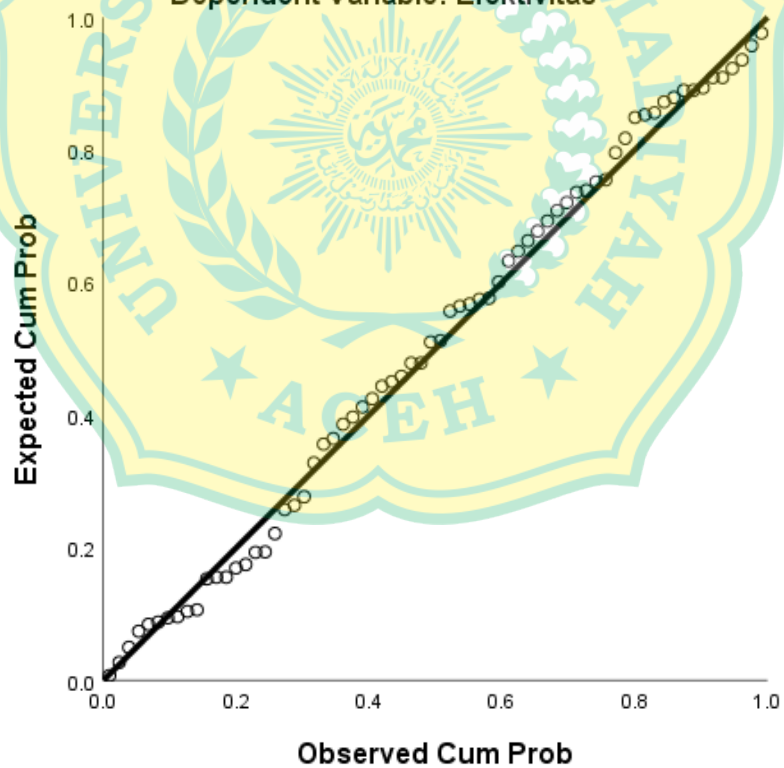
ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.473	3	1.491	20.079	.000 ^b
	Residual	4.752	64	.074		
	Total	9.225	67			
a. Dependent Variable: Efektivitas						
b. Predictors: (Constant), Partisipatif Anggaran, Akuntabilitas, Transparansi						

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.368	.414		3.307	.002		
	Transparansi	.307	.113	.319	2.715	.009	.582	1.719
	Akuntabilitas	.186	.078	.249	2.391	.020	.742	1.348
	Partisipatif Anggaran	.213	.091	.276	2.335	.023	.576	1.737
a. Dependent Variable: Efektivitas								

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Efektivitas	4.4853	.37107	68
Transparansi	4.5000	.38556	68
Akuntabilitas	4.3853	.49754	68
Partisipatif Anggaran	4.3118	.48053	68



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Efektivitas



Lampiran 15 Nilai F Tabel Pada Tingkat Keyakinan 95%

DF 2	DF 1					
	1	2	3	4	5	6
1	161,446	199,499	215,707	224,583	230,160	233,988
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,329
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,688	3,581
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599
21	4,325	3,467	3,072	2,840	2,685	2,573
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,640	2,528
24	4,260	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508
25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603	2,490
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474
27	4,210	3,354	2,960	2,728	2,572	2,459
28	4,196	3,340	2,947	2,714	2,558	2,445
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432
30	4,171	3,316	2,922	2,690	2,534	2,421
31	4,160	3,305	2,911	2,679	2,523	2,409
32	4,149	3,295	2,901	2,668	2,512	2,399
33	4,139	3,285	2,892	2,659	2,503	2,389
34	4,130	3,276	2,883	2,650	2,494	2,380
35	4,121	3,267	2,874	2,641	2,485	2,372
36	4,113	3,259	2,866	2,634	2,477	2,364
37	4,105	3,252	2,859	2,626	2,470	2,356
38	4,098	3,245	2,852	2,619	2,463	2,349
39	4,091	3,238	2,845	2,612	2,456	2,342
40	4,085	3,232	2,839	2,606	2,449	2,336
41	4,079	3,226	2,833	2,600	2,443	2,330
42	4,073	3,220	2,827	2,594	2,438	2,324
43	4,067	3,214	2,822	2,589	2,432	2,319
44	4,062	3,209	2,816	2,584	2,427	2,313
45	4,057	3,204	2,812	2,579	2,422	2,308
46	4,052	3,200	2,807	2,574	2,417	2,304
47	4,047	3,195	2,802	2,570	2,413	2,299
48	4,043	3,191	2,798	2,565	2,409	2,295
49	4,038	3,187	2,794	2,561	2,404	2,290
50	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286

DF 2	DF 1					
	1	2	3	4	5	6
51	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286
52	4,030	3,179	2,786	2,553	2,397	2,283
53	4,027	3,175	2,783	2,550	2,393	2,279
54	4,023	3,172	2,779	2,546	2,389	2,275
55	4,020	3,168	2,776	2,543	2,386	2,272
56	4,016	3,165	2,773	2,540	2,383	2,269
57	4,013	3,162	2,769	2,537	2,380	2,266
58	4,010	3,159	2,766	2,534	2,377	2,263
59	4,007	3,156	2,764	2,531	2,374	2,260
60	4,004	3,153	2,761	2,528	2,371	2,257
61	4,001	3,150	2,758	2,525	2,368	2,254
62	3,998	3,148	2,755	2,523	2,366	2,251
63	3,996	3,145	2,753	2,520	2,363	2,249
64	3,993	3,143	2,751	2,518	2,361	2,246
65	3,991	3,140	2,748	2,515	2,358	2,244
66	3,989	3,138	2,746	2,513	2,356	2,242
67	3,986	3,136	2,744	2,511	2,354	2,239
68	3,984	3,134	2,742	2,509	2,352	2,237
69	3,982	3,132	2,739	2,507	2,350	2,235
70	3,980	3,130	2,737	2,505	2,348	2,233
71	3,978	3,128	2,736	2,503	2,346	2,231
72	3,976	3,126	2,734	2,501	2,344	2,229
73	3,974	3,124	2,732	2,499	2,342	2,227
74	3,972	3,122	2,730	2,497	2,340	2,226
75	3,970	3,120	2,728	2,495	2,338	2,224
76	3,968	3,119	2,727	2,494	2,337	2,222
77	3,967	3,117	2,725	2,492	2,335	2,220
78	3,965	3,115	2,723	2,490	2,333	2,219
79	3,963	3,114	2,722	2,489	2,332	2,217
80	3,962	3,112	2,720	2,487	2,330	2,216
81	3,960	3,111	2,719	2,486	2,329	2,214
82	3,959	3,109	2,717	2,484	2,327	2,213
83	3,957	3,108	2,716	2,483	2,326	2,211
84	3,956	3,107	2,715	2,482	2,324	2,210
85	3,955	3,105	2,713	2,480	2,323	2,209
86	3,953	3,104	2,712	2,479	2,322	2,207
87	3,952	3,103	2,711	2,478	2,321	2,206
88	3,951	3,101	2,709	2,476	2,319	2,205
89	3,949	3,100	2,708	2,475	2,318	2,203
90	3,948	3,099	2,707	2,474	2,317	2,202
91	3,947	3,098	2,706	2,473	2,316	2,201
92	3,945	3,095	2,704	2,471	2,313	2,199
93	3,943	3,094	2,703	2,470	2,312	2,198
94	3,942	3,093	2,701	2,469	2,311	2,197
95	3,941	3,092	2,700	2,467	2,310	2,196
96	3,940	3,091	2,699	2,466	2,309	2,195
97	3,939	3,090	2,698	2,465	2,308	2,194
98	3,938	3,089	2,697	2,465	2,307	2,193
99	3,937	3,088	2,696	2,464	2,306	2,192
100	3,936	3,087	2,696	2,463	2,305	2,191

Lampiran 16 Nilai T Tabel

DF	Tingkat Keyakinan			
	99%	97,5%	95%	90%
1	63,656	25,452	12,706	6,314
2	9,925	6,205	4,303	2,920
3	5,841	4,177	3,182	2,353
4	4,604	3,495	2,776	2,132
5	4,032	3,163	2,571	2,015
6	3,707	2,969	2,447	1,943
7	3,499	2,841	2,365	1,895
8	3,355	2,752	2,306	1,860
9	3,250	2,685	2,262	1,833
10	3,169	2,634	2,228	1,812
11	3,106	2,593	2,201	1,796
12	3,055	2,560	2,179	1,782
13	3,012	2,533	2,160	1,771
14	2,977	2,510	2,145	1,761
15	2,947	2,490	2,131	1,753
16	2,921	2,473	2,120	1,746
17	2,898	2,458	2,110	1,740
18	2,878	2,445	2,101	1,734
19	2,861	2,433	2,093	1,729
20	2,845	2,423	2,086	1,725
21	2,831	2,414	2,080	1,721
22	2,819	2,405	2,074	1,717
23	2,807	2,398	2,069	1,714
24	2,797	2,391	2,064	1,711
25	2,787	2,385	2,060	1,708
26	2,779	2,379	2,056	1,706
27	2,771	2,373	2,052	1,703
28	2,763	2,368	2,048	1,701
29	2,756	2,364	2,045	1,699
30	2,750	2,360	2,042	1,697
31	2,744	2,356	2,040	1,696
32	2,738	2,352	2,037	1,694
33	2,733	2,348	2,035	1,692
34	2,728	2,345	2,032	1,691
35	2,724	2,342	2,030	1,690
36	2,719	2,339	2,028	1,688
37	2,715	2,336	2,026	1,687
38	2,712	2,334	2,024	1,686
39	2,708	2,331	2,023	1,685
40	2,704	2,329	2,021	1,684
41	2,701	2,327	2,020	1,683
42	2,698	2,325	2,018	1,682
43	2,695	2,323	2,017	1,681
44	2,692	2,321	2,015	1,680
45	2,690	2,319	2,014	1,679
46	2,687	2,317	2,013	1,679
47	2,685	2,315	2,012	1,678
48	2,682	2,314	2,011	1,677
49	2,680	2,312	2,010	1,677
50	2,678	2,311	2,009	1,676

DF	Tingkat Keyakinan			
	99%	97,5%	95%	90%
51	2,676	2,310	2,008	1,675
52	2,674	2,308	2,007	1,675
53	2,672	2,307	2,006	1,674
54	2,670	2,306	2,005	1,674
55	2,668	2,304	2,004	1,673
56	2,667	2,303	2,003	1,673
57	2,665	2,302	2,002	1,672
58	2,663	2,301	2,002	1,672
59	2,662	2,300	2,001	1,671
60	2,660	2,299	2,000	1,671
61	2,659	2,298	2,000	1,670
62	2,657	2,297	1,999	1,670
63	2,656	2,296	1,998	1,669
64	2,655	2,295	1,998	1,669
65	2,654	2,295	1,997	1,669
66	2,652	2,294	1,997	1,668
67	2,651	2,293	1,996	1,668
68	2,650	2,292	1,995	1,668
69	2,649	2,291	1,995	1,667
70	2,648	2,291	1,994	1,667
71	2,647	2,290	1,994	1,667
72	2,646	2,289	1,993	1,666
73	2,645	2,289	1,993	1,666
74	2,644	2,288	1,993	1,666
75	2,643	2,287	1,992	1,665
76	2,642	2,287	1,992	1,665
77	2,641	2,286	1,991	1,665
78	2,640	2,285	1,991	1,665
79	2,639	2,285	1,990	1,664
80	2,639	2,284	1,990	1,664
81	2,638	2,284	1,990	1,664
82	2,637	2,283	1,989	1,664
83	2,636	2,283	1,989	1,663
84	2,636	2,282	1,989	1,663
85	2,635	2,282	1,988	1,663
86	2,634	2,281	1,988	1,663
87	2,634	2,281	1,988	1,663
88	2,633	2,280	1,987	1,662
89	2,632	2,280	1,987	1,662
90	2,632	2,280	1,987	1,662
91	2,631	2,279	1,986	1,662
92	2,630	2,279	1,986	1,662
93	2,630	2,278	1,986	1,661
94	2,629	2,278	1,986	1,661
95	2,629	2,277	1,985	1,661
96	2,628	2,277	1,985	1,661
97	2,627	2,277	1,985	1,661
98	2,627	2,276	1,984	1,661
99	2,626	2,276	1,984	1,660
100	2,626	2,276	1,984	1,660

Lampiran 17 Nilai-Nilai r Product Moment Pada Keyakinan 95%

n	Nilai r	n	Nilai r	n	Nilai r
3	0,997	27	0,381	55	0,266
4	0,950	28	0,374	60	0,254
5	0,878	29	0,367	65	0,244
6	0,811	30	0,361	70	0,235
7	0,754	31	0,355	75	0,227
8	0,707	32	0,349	80	0,220
9	0,666	33	0,344	85	0,213
10	0,632	34	0,339	90	0,207
11	0,602	35	0,334	95	0,202
12	0,576	36	0,329	100	0,195
13	0,553	37	0,325	125	0,176
14	0,532	38	0,320	150	0,159
15	0,514	39	0,316	175	0,148
16	0,497	40	0,312	200	0,138
17	0,482	41	0,308	300	0,113
18	0,468	42	0,304	400	0,098
19	0,456	43	0,301	500	0,088
20	0,444	44	0,297	600	0,080
21	0,433	45	0,294	700	0,074
22	0,423	46	0,291	800	0,070
23	0,413	47	0,288	900	0,065
24	0,404	48	0,284	1000	0,062
25	0,396	49	0,281		
26	0,388	50	0,279		

Note : n = Jumlah Sampel